

# Jurnal Akuntansi

*TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*

Constantinus Nurak, Yohana Febiani Angi  
**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN  
PENGALAMAN AUDIT TERHADAP PENDETEKSIAN  
KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nasly Betsyeba Mahalia Loni, Yohana Febiani Angi, Cicilia A. Tungga  
**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN  
2016-2020**

Maria Arnita Herawati Garum, Yohanes Demu, Maria Indriyani Hewe Tiwu  
**PENGARUH LABA KOTOR, LABA OPERASI DAN LABA BERSIH  
DALAM MEMPREDIKSI ARUS KAS DI MASA MENDATANG  
(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG  
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019)**

Ady Cusrell William Ly, Anthon Simon Y. Kerihi, Sarlin Paleina Nawa Pau  
**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN  
INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA**

Theodora Vivinia Ndait, Minarni Anaci Dethan, Sarlin Paleina Nawa Pau  
**PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, PERILAKU BELAJAR  
DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI  
(STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS UNIVERSITAS NUSA CENDANA)**

Bernafus Adito MG, Yohanes Demu, Maria P. L. Muga  
**MANAJEMEN ASET BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA  
PLEDO KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR**

Mohamad Anwar Thalib, Sri Mandalika Mosu, Siskawati Yunus Njuu  
**MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI DI MASJID BERBASIS  
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL GORONTALO**

**Volume 10, No. 1, Maret 2022**

Hal. 01 - 78

ISSN : 2338-4468

E-ISSN : 2715-1158

# Jurnal Akuntansi

*TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*

## **PELINDUNG / PENASEHAT**

Dekan FEB UNDANA

Dr. Apriana H. J. Fanggidae, SE., M.Si

## **PENANGGUNG JAWAB**

Ketua Program Studi Akuntansi

Linda Lomi Ga, SE., MSA

## **PEMIMPIN REDAKSI**

Sarinah Joyce M. Rafael, SE., M.Acc., Ak., CA

## **EDITOR**

Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., CFrA.

Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., CA

Angga P. Karpriana, SE., MAcc., Ak., CA

Meliza Putrianti Zifi, SE., M.Acc.

Maria Elerina Douk Tunti, SE., M.Si.

Moni W. Muskanan, SE., MPA, CFrA.

Yohana Febiani Angi, SE., MAKS

Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Ak.

I Komang Arthana, SE., M.Si., CFrA

## **REVIEWER**

Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE,  
M.Com. (Hons), CSRS, Ph.D

(Universitas Brawijaya);

Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com  
(Hons), Ph.D., Ak. (Universitas Negeri  
Solo);

Prof. Intiyas Utami, M.Si., CA., CMA.,  
QIA (Universitas Kristern Satya  
Wacana)

Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D., Akt., CA  
(Universitas Lampung);

Dr. Anthon Simon Yohanis Kerih, SE,  
MSi. (Universitas Nusa Cendana);

Halim Dedy Perdana, SE., MSM.,  
M.Rech., Ak., CFrA (KAP DBSD)

Nuur Widiastono, SE., MSE., Ak., CFE.,  
CA., ACPA (IAI Wilayah NTT)

## **ALAMAT REDAKSI**

Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT

Telp. (0380) 881183

Fax. (0380) 881183

Email: jak.feb@undana.ac.id

*Terbit 2x: MARET dan OKTOBER*

**Jurnal Akuntansi:**  
**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**  
diterbitkan oleh:  
**UNIVERSITAS NUSA CENDANA**

## **DAFTAR ISI**

### ***1 – 14***

- **PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN AUDIT TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
Constantinus Nurak  
Yohana Febiani Angi

### ***15 – 24***

- **ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016-2020**  
Nasly Betsyeba Mahalia Loni  
Yohana Febiani Angi  
Cicilia A. Tungga

### ***25 – 37***

- **PENGARUH LABA KOTOR, LABA OPERASI DAN LABA BERSIH DALAM MEMREDIKSI ARUS KAS DI MASA MENDATANG (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019)**  
Maria Arnita Herawati Garum  
Yohanes Demu  
Maria Indriyani Hewe Tiwu

### ***38 - 48***

- **ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN SABU RAIJUA**  
Ady Cusrell William Ly  
Anthon Simon Y. Kerih  
Sarlin P. Nawa Pau

### ***49 - 57***

- **PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, PERILAKU BELAJAR DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NUSA CENDANA)**  
Theodora Vivinia Ndait  
Minarni Anaci Dethan

Sarlin Paleina Nawa Pau

**58-66**

- **MANAJEMEN ASET BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PLEDO  
KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR**

Bernafus Adito MG

Yohanes Demu

Maria P. L. Muga

**66 – 78**

- **MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI DI MASJID BERBASIS NILAI-  
NILAI KEARIFAN LOKAL GORONTALO**

Mohamad Anwar Thalib

Sri Mandalika Mosu

Siskawati Yunus Njuu



**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI DAN PENGALAMAN AUDIT  
TERHADAP PENDETEKSIAN KECURANGAN DALAM LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Constantinus Nurak  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
constantinusnurak@gmail.com

Yohana Febiani Angi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
yfangi@staf.undana.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 51 auditor. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit mampu menjelaskan variabel dependen (pendeteksian kecurangan) sebesar 76,7%, sedangkan sisanya 23,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

***Kata Kunci: Kompetensi, Independensi, Pengalaman Audit, Pendeteksian Kecurangan***

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the effect of competence, independence, and audit experience on fraud detection. This research was conducted on Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) for the province of East Nusa Tenggara. The number of samples used in this research were 51 auditors. Data collection was carried out by questionnaire using simple random sampling method. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS 25 application program. The result showed that the competence and audit experience have a significant impact on the fraud detection, while the independence variable do not have a significant impact on fraud detection. The result of the F test (simultaneous) showed that competence, independence and audit experience together have a significant impact on fraud detection. The coefficient of determination showed that competence, independence, and audit experience are able to explain the dependent variable (fraud detection) by 76,7%, while the remaining 23,3% is influenced by other variables outside the research.*

***Key Words: Competence, Independence, Audit Experience, Fraud Detection***

## PENDAHULUAN

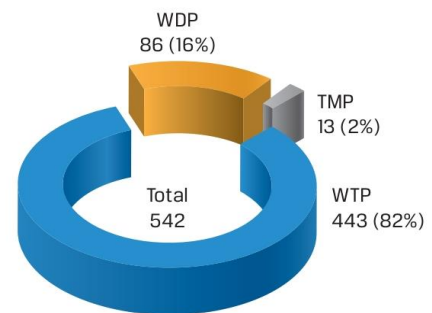
Perkembangan reformasi yang terjadi dalam segala bidang yang didukung oleh masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu bentuk tuntutan reformasi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan adanya reformasi tersebut, perlu adanya pertimbangan yang mendasari diselenggarakannya otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan juga aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Praktik kecurangan terjadi dalam berbagai sektor salah satunya sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil survei *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang menunjukkan bahwa sektor pemerintahan berada di urutan kedua dalam kasus kecurangan dengan persentase sebesar 33,9%. Kecurangan merupakan salah satu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang menggunakan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintahan daerah dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun

2019 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD tahun 2018 yang wajib diserahkan. Terhadap 542 LKPD tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan 443 opini Wajar Tanpa Pengecualian (82%), 86 opini Wajar Dengan Pengecualian (16%), dan 13 opini Tidak Memberikan Pendapat (2%), seperti yang disajikan pada Gambar 1.

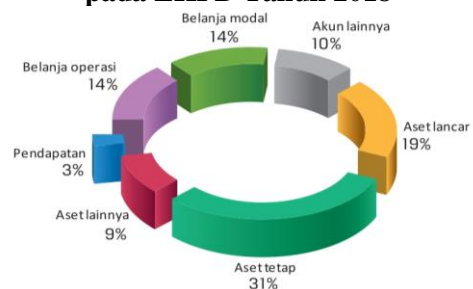
**Gambar 1**  
**Grafik Opini LKPD Tahun 2018**



Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), 2021

Sebanyak 99 LKPD belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup dapat dilihat pada Gambar 2.

**Gambar 2**  
**Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2018**



Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id), 2021

Berdasarkan Gambar 2, tiga akun terbesar yang mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2018 yaitu aset tetap pada 78 PEMDA antara lain: (1) pencatatan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan atau tidak akurat; (2) aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain; (3) penambahan aset tetap setelah perolehan belum diatribusikan ke aset induk sehingga berdampak pada perhitungan akumulasi penyusutan. Aset lancar pada 48 PEMDA, antara lain: (1) saldo dana BOS tidak dicatat secara riil dan akurat, serta kas belum disajikan karena belum diverifikasi pertanggungjawabannya secara memadai; (2) piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi serta penghapusan piutang tidak sesuai dengan ketentuan; dan (3) penyajian saldo persediaan belum mencakup saldo persediaan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Belanja operasi pada 34 PEMDA antara lain: (1) kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa belum dipulihkan dengan penyetoran kas ke daerah; dan (2) belanja pegawai serta belanja barang dan jasa tidak didukung dengan bukti dokumen pencairan yang memadai serta tidak dilengkapi dengan laporan penggunaan dana.

Berdasarkan data opini LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 bisa dilihat bahwa dari 23 LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 11 LKPD yang belum mendapatkan opini WTP yang dikarenakan dalam penyajiannya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Secara umum yang menjadi pengecualian pada LKPD yang mendapat opini WDP antara lain: Kas di Bendahara BOS dengan permasalahan (1) pencatatan saldo kas di bendahara BOS dan belanja BOS belum sesuai

kondisi riil; (2) sekolah penerima dana BOS mempunyai lebih dari satu rekening; (3) sisa kas di bendahara BOS belum dipertanggungjawabkan; (4) saldo kas di bendahara BOS tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid; (5) saldo kas di bendahara BOS belum dibuatkan Surat Pengesahan Belanja (SPB); dan (6) verifikasi, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan dana BOS belum optimal. Adapun penyajian aset tetap dengan permasalahan (1) aset tetap tercatat secara gabungan, serta biaya perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, peningkatan dan honorarium belum dikapitalisasi ke aset induknya; (2) aset tetap belum direkonsiliasi, belum diinventarisasi, dan tidak diketahui keberadaannya; (3) tanah di bawah jalan, serta tanah di bawah ruas jaringan dan daerah irigasi belum diinventarisasi dan dicatat; (4) terdapat aset tetap yang dicatat dengan nilai 0 (nihil); dan (5) kesalahan perhitungan penyusutan karena kelebihan masa manfaat atas aset tetap. Pernyataan Standar Umum dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), menyatakan bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan, sejalan dengan yang dikemukakan oleh Pelu (2020) untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, maka auditor harus didukung oleh kompetensi, karena dengan memiliki kompetensi yang memadai, auditor dapat mengasah sensitivitas (kepekaannya) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya sehingga auditor mengetahui apakah didalam laporan keuangan tersebut terdapat tindakan kecurangan atau tidak serta mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut. Pengalaman auditor akan semakin berkembang dengan bertambahnya penugasan audit, adanya diskusi mengenai audit dengan rekan sekerja, dan dengan adanya program pelatihan.

Oleh sebab itu, pengalaman kerja dipandang sebagai satu faktor yang penting dalam memprediksi kinerja auditor (Januarti, 2011). Menurut Fransisco, dkk (2019) menyatakan bahwa pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman. Berdasarkan pernyataan standar umum dalam Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dari gangguan pribadi maupun eksteren yang dapat mempengaruhi independensinya. Sikap independensi diperlukan auditor agar ia bebas dari kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga auditor dapat mendeteksi ada tidaknya kecurangan pada perusahaan yang diauditnya dengan tepat, dan setelah kecurangan tersebut terdeteksi, auditor tidak ikut terlibat dalam mengamankan praktik kecurangan tersebut (Putra, 2017). Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah kompetensi auditor eksternal pemerintah, Independensi dan pengalaman auditor eksternal pemerintah berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah ?

## KAJIAN TEORI

### Teori Perilaku

Dalam teori perilaku menurut Ajzen (1991:197) pandangannya mengenai konsep teori perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

mengasumsikan bahwa manusia biasanya akan berperilaku pantas (*behave in a sensible manner*) sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungannya. Berdasarkan teori ini, maka tujuan dan manfaat adalah untuk meramalkan dan memahami pengaruh-pengaruh motivasi perilaku, baik kemauan individu itu sendiri maupun bukan kemauan dari individu itu sendiri. Teori perilaku menurut Januarti (2011) memiliki 3 (tiga) fungsi dasar yaitu:

1. Terkait dengan sikap dasar seseorang, contohnya adalah sikap seseorang terhadap intuisi, orang lain, atau obyek. Teori ini dapat menjelaskan bahwa sikap dasar atau kepribadian seseorang terbentuk atas respon seseorang terhadap lingkungan, obyek dan intuisi. Berkaitan pula dengan hal itu, sikap independensi yang ditunjukkan auditor merupakan suatu sikap dalam menghadapi suatu kasus atau penugasan audit yang diberikan.
2. Menggambarkan pengaruh sosial yang disebut norma subyektif. Berkaitan dengan kemampuan persepsi individu tentang perilaku tertentu yang dipengaruhi oleh penilaian orang lain yang signifikan.
3. Berkaitan dengan isu kontrol, faktor ini berkaitan dengan masa lalu dan persepsi seseorang terhadap seberapa sulit untuk melakukan suatu perilaku, contohnya adalah pengalaman audit dalam melakukan prosedur audit dalam penugasan auditnya.

Berdasarkan ketiga fungsi dasar dari teori perilaku di atas erat kaitannya dengan pengetahuan dan pengalaman juga menjadi faktor penting bagi pendeteksian kecurangan oleh seorang auditor (Nasution, 2012). Pengalaman audit adalah yang diperoleh auditor selama melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang

pernah ditangani menurut (Suraida, 2006).

### **Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Teori atribusi mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Muhaliq, 2019).

Menurut Luthans (2005:182), atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses kognitif dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku orang lain. Terdapat dua jenis umum atribusi yang ada pada orang, yaitu atribusi disposisional, yang menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, dan atribusi situasional yang menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

Teori ini juga mendeskripsikan cara-cara penilaian perilaku seseorang baik yang berasal dari internal atau eksternal (Robbins, 2008). Robbins dan Judge menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan) bersama-sama mampu menentukan perilaku manusia.

Teori atribusi dalam penelitian ini, mampu menjelaskan karakteristik independensi. Karakteristik

independensi seorang auditor merupakan salah satu penentu terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas.

### **Kompetensi**

Menurut Suastika, Dkk (2016) Kompetensi merupakan kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Surat Keputusan MENDIKNAS Nomor 045/U/2002 Tentang Perguruan Tinggi, (2002) tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan "Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melakukan tugasnya di bidang tertentu".

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Jusup, 2014:365). Kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan saksama (Muhaliq, 2019). Kemahiran profesional berarti bahwa seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus dengan tekun dan cermat. Kecermatan tersebut meliputi dokumentasi audit kecukupan bukti, serta ketetapan laporan audit. Secara profesional auditor tidak diperbolehkan untuk bertindak ceroboh yang menimbulkan suatu kesalahan (Elder, 2012).

Kompetensi Menurut Halim (2003:49) terdapat tiga faktor yaitu:

1. Pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi termasuk ujian profesi auditor.
2. Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing.
3. Pendidikan profesional berkelanjutan selama menekuni karir auditor profesional

Berdasarkan Beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kompetensi adalah keahlian dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta untuk dapat



memiliki keahlian sebagai seorang auditor seseorang harus memperoleh pendidikan formal serta pelatihan yang memadai.

Kompetensi auditor dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Efendy (2010) dimana disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah. Selain itu, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi.

### **Independensi**

Menurut Mulyadi (2011:26) independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh orang lain, serta merupakan kejujuran dalam diri auditor untuk bersikap objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Mulyadi (1992) dalam Efendy (2010) mendefinisikan independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.

Arens, dkk (2012) mengatakan independensi terdiri dari dua komponen yaitu 1) independensi dalam fakta (*independence in fact*) yang merupakan adanya kejujuran yang dimiliki auditor dalam mempertimbangkan fakta-fakta atau terdapat pertimbangan secara objektif, tidak memihak di dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 2) independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) yang artinya adanya kesan dari publik bahwa seorang auditor menerapkan sikap independen.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Independensi adalah sebuah sikap mental yang

dimiliki oleh seorang auditor sebagai pihak yang berdiri secara independen sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil auditnya.

Independensi auditor dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Efendy (2010) dimana disebutkan bahwa auditor yang independen haruslah auditor yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan atau gangguan yang berasal dari luar maupun dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

### **Pengalaman Audit**

Menurut Menurut Suastika, Dkk (2016) pengalaman merupakan sesuatu yang pernah dialami, dijalani, dirasai, ditanggung, dan sebagainya. Ajeng (2016) menyatakan bahwa pengalaman merupakan gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi yang dilakukan secara berulang-ulang dengan sesama benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan.

Widiyastuti (2016) mendefinisikan pengalaman auditor sebagai ukuran tentang lama waktu atau masa kerja dan banyaknya penugasan yang telah dilalui oleh seorang dalam memahami tugas-tugas pekerjaannya dengan baik. Hilmi, (2011) mengemukakan bahwa pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja. Semakin sering auditor melakukan pekerjaan yang sama, semakin cepat dan terampil auditor dalam melakukan pekerjaannya.

Menurut Ansah dalam Putra (2017) pengalaman audit ditunjukkan dengan jam terbang auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan

penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman audit merupakan rentang waktu atau masa yang telah dijalani oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagai seorang auditor dan diwaktu yang bersamaan dapat mengasah kemampuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan atau kecurangan. Pengalaman audit dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian Biska dan Wiratmaja (2016) dimana disebutkan bahwa pengalaman auditor sebagai ukuran tentang lama waktu atau masa kerja dan banyaknya penugasan yang telah dilalui oleh seorang.

### **Pendeteksian Kecurangan**

Kecurangan merupakan suatu istilah yang umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu yang dipilih oleh seorang individu maupun kelompok untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah (Missa, 2020). Vona (2008:6) mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan yang dilakukan didalam organisasi, atau oleh organisasi, atau terhadap organisasi. Tindakan tersebut dilakukan oleh pihak dalam ataupun pihak luar secara sengaja dan terselubung.

Endiana (2019) mendefinisikan kecurangan merupakan suatu istilah yang umum, dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu, yang dipilih oleh seorang individu, untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Pengertian kecurangan (*fraud*) menurut Tugiman (2006:3) adalah suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu. Menipu atau memberikan yang keliru untuk keuntungan pribadi atau kelompok

secara tidak *fair* baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan berbagai macam kecerdikan individu maupun kelompok yang direncanakan dan dilakukan guna mendapatkan keuntungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dengan kata lain kecurangan adalah penipuan yang disengaja untuk mendapatkan hak atau aset dari pihak lain.

### **Jenis-Jenis Kecurangan**

Secara skematis, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menggambarkan *fraud* atau kecurangan dalam bentuk *fraud tree* atau pohon *fraud*. Skema ini menggambarkan cabang-cabang *fraud* dalam hubungan kerja beserta ranting dan anak rantingnya masing-masing. Adapun *fraud tree* atau pohon *fraud* dalam *occupational fraud* (hubungan kerja) secara umum *fraud* (kecurangan) terbagi dalam tiga, yaitu:

a. Korupsi

Korupsi mencakup beberapa hal seperti konflik kepentingan rekan atau keluarga dalam proyek (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), pengambilan dana secara paksa (*economic extortion*), permainan dalam tender dan gratifikasi terselubung (*illegal gratuities*).

b. Pengambilan aset secara illegal

Pengambilan aset secara illegal ini maksudnya adalah pengambilan aset secara tidak sah atau melawan hukum. Adapun pengambilan aset secara ilegal mencakup (1) *Skimming* atau penjarahan yaitu uang dijajah sebelum masuk kas perusahaan atau dengan kata lain, dana diambil sebelum adanya pembukuan; (2) *Lapping* atau pencurian yaitu uang dijajah sesudah masuk kas perusahaan. Contohnya seperti

pembebanan tagihan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pembayaran biaya-biaya yang tidak logis serta pemalsuan cek; (3) *Kitting* atau penggelapan dana yaitu adanya bentuk penggelembungan dana, atau adanya dana mengambang (*free money*).

- c. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan  
Pernyataan palsu atau salah Pernyataan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

### **Konsep Segitiga Kecurangan (*fraud triangle*)**

Menurut Muhalip (2019) salah satu pertimbangan penting yang harus dilakukan oleh seorang auditor dalam mengungkap kecurangan adalah dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kecurangan dan yang meningkatkan resiko kecurangan terjadi. Arens,dkk (2012:375) menjelaskan bahwa terdapat *fraud triangle* yang berisi mengenai tiga kondisi penyebab terjadinya kecurangan yaitu sebagai berikut:

- a. Tekanan (*Pressure*)  
Tekanan merupakan situasi dimana seseorang merasa atau memiliki kebutuhan untuk melakukan kecurangan, pengaruh desakan dalam pikiran dan keinginan inilah yang menjadi kekuatan moral.
- b. Peluang (*Opportunity*)  
Peluang merupakan situasi dimana seseorang percaya adanya kemungkinan untuk melakukan kecurangan dan percaya bahwa kecurangan tersebut tidak terdeteksi. Kecurangan yang disebabkan oleh peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang

lemah, manajemen pengawasan yang kurang baik dan penggunaan posisi.

- c. Rasionalisasi (*Rationalization*)  
Rasionalisasi merupakan kondisi dimana seseorang yang telah melakukan kecurangan mencari pembenaran atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya. Rasionalisasi biasanya dimulai dengan jumlah yang sedikit dan berkembang terus-menerus. Selain itu pelaku kecurangan biasanya beranggapan bahwa apa yang telah diberikan pada perusahaan jauh lebih besar daripada apa yang diambil dari perusahaan.

### **Pendeteksian Kecurangan**

Kumaat (2011:156) mengemukakan bahwa mendeteksi fraud adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak fraud, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku fraud (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit).

Menurut *Pusdiklatwas BPKP*. (2008) tujuan dalam mendeteksi kecurangan, yaitu untuk mengetahui bahwa kecurangan telah terjadi (ada), apakah perusahaan ataupun organisasi menjadi korban atau sebagai pelaku kecurangan, adanya kelemahan dalam pengendalian internal serta moral pelaku yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan, dan adanya kondisi lingkungan perusahaan ataupun organisasi yang menyebabkan terjadinya kecurangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendeteksian kecurangan merupakan tindakan untuk mendapatkan indikasi bahwa telah terjadi tindakan kecurangan dalam perusahaan atau instansi guna mencegah pelaku kecurangan melakukan praktik kecurangan di masa mendatang.

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam penelitian ini diukur dengan indikator-indikator yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan Muhalip (2019) yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman atas Tugas Pokok dan Fungsi Instansi  
Pemahaman auditor atas proses kegiatan instansi merupakan suatu langkah awal dalam mendeteksi kecurangan. Sebelum melaksanakan pendeteksian kecurangan, auditor dituntut untuk memahami proses kinerja dan mekanisme pertanggungjawaban pada suatu unit. Selanjutnya, auditor mempertimbangkan apakah tingkat pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi instansi telah cukup memadai bagi auditor untuk melakukan suatu analisis potensi-potensi kecurangan atau masih memerlukan informasi lanjutan dalam rangka melengkapi pengetahuan dasar serta latar belakang terjadinya indikasi tindak kecurangan. Pengetahuan dan pemahaman dalam tahap informasi awal ini akan menjadi dasar perencanaan penugasan audit kecurangan. Pemahaman akan kian tajam sehingga auditor pun semakin dapat menentukan bentuk penyimpangan, pihak yang terkait, bukti-bukti yang diperlukan, dan dimana bukti tersebut berada. Selain itu, auditor juga akan dapat melihat penyebab munculnya penyimpangan.
- b. Pemahaman Sistem Pengendalian Intern.  
Auditor harus memahami pengendalian intern auditee, yang berkaitan dengan tingkat keandalannya sekaligus mengidentifikasi kelemahannya. Hal ini penting untuk melihat latar belakang terjadinya indikasi tindak kecurangan dan pertimbangan risiko kemungkinan terjadinya tindak kecurangan.

Evaluasi terhadap pengendalian intern, secara umum berkaitan dengan risiko pelaksanaan audit. Dalam audit kecurangan, evaluasi ini lebih diarahkan kepada risiko berkaitan dengan terjadinya suatu tindak kecurangan. Semakin lemah pengendalian intern dari instansi, maka dugaan adanya tindak kecurangan akan semakin kuat.

### **Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Diduga kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.  
H2: Diduga independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.  
H3: Diduga pengalaman audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.  
H4: Diduga kompetensi, independensi, dan pengalaman audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan berupa data opini Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang jumlah dan persentase opininya telah tergabung dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, profil dan sejarah dari Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan data kuantitatif yang digunakan adalah data jumlah auditor pada BPK perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 dan jawaban dari kuesioner yang diisi oleh responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berjumlah 112 auditor yang terdiri dari yang terdiri dari

6 orang pemeriksa madya, 26 orang pemeriksa muda, dan 80 orang pemeriksa pertama. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*, dimana setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Sehingga sampel dalam penelitian ini yang dihitung menggunakan rumus slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{112}{1 + 112(0,1)^2} = 52,83$$

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah sebanyak 53 orang (dibulatkan) yang merupakan auditor di Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 25. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y	=	Kemampuan Mendeteksi Kecurangan
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	=	Koefisien regresi berganda
$X_1$	=	Kompetensi
$X_2$	=	Independensi
$X_3$	=	Pengalaman
$\epsilon$	=	Standar Error

#### Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini terbagi dua yaitu uji hipotesis secara simultan (uji F) dan uji hipotesis secara parsial (uji t).

a. Uji F bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulan terhadap hipotesis sebagai berikut:

1) Bila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau angka signifikansi  $>$  taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2) Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau angka signifikansi  $<$  taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan kesimpulan terhadap hipotesis sebagai berikut:

1) Bila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau angka signifikansi  $>$  taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2) Bila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau angka signifikansi  $<$  taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2011:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi adalah 0,151. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,044.



Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai  $t_{hitung} 2,065 > t_{tabel} 2,011$ . Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat De Angelo (1981) dalam Efendy (2010) bahwa kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi). Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pelu,dkk 2016) yang menyatakan bahwa apabila seorang auditor memiliki kompetensi yang tinggi maka auditor akan lebih mudah dalam menyelesaikan tugasnya. Sehingga auditor mampu meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan audit secara efektif. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Fransisco, dkk (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi terhadap pendeteksian kecurangan. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa dalam mendeteksi kecurangan, seorang auditor bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah mendeteksi kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang diauditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam pendeteksian kecurangan.

#### **Pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel independensi adalah 0,111. Nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,167. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai  $t_{hitung} 1,403 < t_{tabel} 2,011$ . Hal ini menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh

signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Samelson, dkk. (2006) yang menyimpulkan bahwa independensi tidak mempunyai hubungan dengan kualitas audit. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010) dan Pratama,dkk (2019) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara independensi terhadap pendeteksian kecurangan dikarenakan independensi auditor masih terpengaruh dengan penentu kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja perangkat daerah. Akibatnya, meskipun auditor mengalami gangguan independensi, namun auditor tetap menganggap bahwa audit yang baik tetap harus dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan yang terjadi pada Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi Nusa Tenggara Timur yang selama beberapa tahun terakhir melakukan mutasi guna peningkatan kinerja. Hal ini diperkuat oleh teori atribusi yang mempelajari tentang proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Terdapat dua jenis umum atribusi yang ada pada orang, yaitu atribusi disposisional, yang menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, dan atribusi situasional yang menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti aturan atau pengaruh sosial dari orang lain.

#### **Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Pendeteksian Kecurangan**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel kompetensi adalah 0,310. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0,000. Hasil ini didukung oleh hasil perhitungan nilai  $t_{hitung} 4,265 > t_{tabel} 2,011$ . Hal ini menunjukkan bahwa

kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.

Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan pendapat (Nirmala, 2013) Ansah (2017) yang menyatakan bahwa auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) dan Atmaja (2016) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa dalam mendeteksi kecurangan, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat pengalaman auditnya. Jika auditor memiliki pengalaman audit yang baik maka auditor akan dengan mudah mendeteksi kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan yang diauditnya.

### **Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Pengalaman Audit terhadap Pendeteksian Kecurangan**

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil pengujian statistik uji F (simultan) bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yakni sebesar  $51,445 > 3,20$  dan nilai signifikansi antara variabel kompetensi, independensi, dan pengalaman audit sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi, independensi, dan

pengalaman audit yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin baik tingkat pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan.

Besarnya pengaruh variabel kompetensi, independensi, dan pengalaman audit dapat diketahui dengan melihat nilai  $R^2$  pada pengujian koefisien Determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai sebesar 0,767 atau 76,7%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kompetensi, independensi, dan pengalaman audit dapat menjelaskan pendeteksian kecurangan sebesar 76,7% dan sisanya sebesar 23,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian. Variabel-variabel lain tersebut antara lain tekanan waktu, objektivitas, skeptisme profesional dan etika profesi. Nirmala (2013) mengemukakan bahwa tekanan waktu adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun yang sangat ketat dan kaku. Bimantara (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa objektivitas berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan karena objektivitas merupakan salah satu faktor dari prinsip integritas yang harus dipegang teguh oleh pemeriksa. Penelitian yang dilakukan Biska (2016) mengemukakan bahwa skeptisme profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian kecurangan karena skeptisme profesional membuat auditor tidak mudah percaya terhadap asersi manajemen sehingga meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kecurangan. Andini (2019) mengemukakan bahwa etika profesi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan karena etika seorang auditor memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, dimana auditor

harus memegang komitmen dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor.

### KESIMPULAN

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya terkait pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, seperti yang dikemukakan De Angelo (1981) dalam Efendy (2010) bahwa kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi).
2. Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian, sejalan dengan yang dikemukakan Pratama,dkk (2019) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara independensi terhadap pendeteksian kecurangan dikarenakan independensi auditor masih terpengaruh dengan penentu kebijakan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja perangkat daerah.
3. Pengalaman audit berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan, sejalan dengan pendapat Ansah (2017) yang menyatakan bahwa auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan
4. Kompetensi, independensi, dan pengalaman audit secara simultan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) yang menyatakan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan antara kompetensi, independensi, dan pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan.

### 5. Limitasi dan Studi Lanjutan

1. Jumlah responden yang hanya 53 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.
3. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
4. Diharapkan adanya tambahan variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Arens, A. A., dan Loebbecke, K. J. (2012). *Auditing: Pendekatan Terpadu*. Erlangga.
- Biska, I. A. I., dan Wiratmaja, N. I. D. (2016). Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme Profesional Auditor pada Pendeteksian Kecurangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3).
- Elder, R. J. (2012). *Jasa Audit dan Assurance*. Salemba Empat.
- Fransisco, Fransiskus, Indri, Pordinan, Rara, Rizqi, Zulmanto, dan Umar, H. (2019). Pengaruh Kompetensi,

- Independensi dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan dengan Skeptisme Profesional Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar. Prosiding Seminar Nasional Pakar.*
- Halim, A. (2003). *Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Hilmi, F. (2011). Pengaruh Pengalaman, Independensi dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Kecurangan. *Prodi Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*
- Januarti, I. (2011). Analisis Pengaruh Pengalaman Auditor, Komitmen Profesional, Orientasi Etis dan Nilai Etika Organisasi Terhadap persepsi dan Pertimbangan Etis. *Simposium Nasional Akuntansi XIV.*
- Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi*. Penerbit Andi.
- Missa, P. F. (2020). Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Karyawan di Bidang Akuntansi tentang Fraud. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 2(105).
- Mahalip. (2019). Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional dan Pertimbangan Risiko Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. *Tesis. Kendari: Universitas Halu Oleo.*
- Nasution, H. (2012). Pengaruh beban Kerja, Pengalaman Audit dan Tipe Kepribadian Terhadap Skeptisme Profesional dan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Universitas Indonesia.*
- Nirmala, dan N. C. (2013). Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Profesional Care, Akuntabilitas, Kompleksitas Audit, dan Time Budget Pressure terhadap Kualitas Audit. *Journal of Accounting*, 2(3).
- Pelu, M. F. A., Muslim, dan N. (2016). Pengaruh Kompetensi, Skeptisme Profesional Auditor dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigasi. *Ekonomika*, 4, 1. *Pusdiklatwas BPKP. (2008). Etika Dalam Fraud Audit. Jakarta: BPKP. (n.d.).*
- Putra, T. A. P. S. 2. (2017). Pengaruh Independensi, Kompetensi, dan Pengalaman Auditomerintah (APIP) terhadap Pender Aparat Pengawas Intern Peteksian Fraud dengan Skeptisisme Profesional sebagai Variabel Intervening pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau. *Coopetition*, 8(1).
- Robbins, S. dan T. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Salemba Empat.
- Suraida, I. (2006). Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. *Sosiohumaniora*, 7(3).
- Surat Keputusan MENDIKNAS Nomor 045/U/2002 tentang Perguruan Tinggi, (2002).
- Vona, L. (2008). *Fraud Risk Assessment: Building a Fraud Audit Program John Wiley and Sons, Inc.*
- Widiyastuti, M. dan Pamudji, S. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud). *Jurnal UNIMUS*, 5(2).

## **ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016-2020**

**Nasly Betsyeba Mahalia Loni**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
betzyebamahalia@gmail.com

**Yohana Febiani Angi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
yfangi@staf.undana.ac.id

**Cicilia A. Tungga**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan kemandirian keuangan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mengambil data keuangan berupa laporan realisasi anggaran dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tidak mandiri bahkan belum menyentuh setengah dari tingkat kemandirian tertinggi, tahun 2016 kemandirian paling tinggi yang dicapai adalah kriteria “kurang” dengan persentase kemandirian paling tinggi dicapai oleh Kota Kupang sebesar 18%, tahun 2017 kemandirian paling tinggi yang dicapai adalah kriteria “sedang” naik satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya dengan persentase kemandirian paling tinggi dicapai oleh Kota Kupang sebesar 27%, tahun berikutnya 2018 kriteria paling tinggi yang dicapai adalah kriteria “kurang” persentase kemandirian paling tinggi dicapai oleh Kota Kupang sebesar 19%, untuk tahun 2019 dan 2020 kriteria paling tinggi yang dicapai adalah kriteria “sedang” yang dicapai oleh Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2019 sebesar 22% dan Kota Kupang untuk tahun 2020 sebesar 21%.

**Kata Kunci:** *Kemandirian Keuangan, Realisasi Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah*

### **ABSTRACT**

*This study aims to identify and explain the financial independence of districts and cities in East Nusa Tenggara Province based on financial independence ratio analysis with a quantitative descriptive approach. Data collection was carried out using the documentation method, namely by taking financial data in the form of Budget Realization Reports from 22 Regencies/Cities in East Nusa Tenggara Province in 2016-2020. The results of the study show that the level of independence of districts/cities in East Nusa Tenggara Province Not independent has not even touched half of the highest level of independence, in 2016 the highest independence achieved was the "less" criterion with the highest percentage of independence achieved by Kupang City at 18%, In 2017 the highest independence achieved was the "moderate" criteria, an increase of one level compared to the previous year with the highest percentage of independence achieved by the City of Kupang at 27%, the following year 2018 the highest criteria achieved were the "less" criteria, the highest percentage of independence was achieved by Kupang City is 19%, for 2019 and 2020 the highest criteria achieved are the "medium" criteria achieved by West Manggarai Regency in 2019 by 22% and Kupang City for 2020 by 21%.*

**Keywords:** *Financial Independence, Budget Realization, Local Revenue, Central Government Transfer, Local Government*



## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang bisa dinilai dengan uang, oleh sebab itu perlu adanya pengelolaan yang profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas serta *value for money* (efektif, efisien dan ekonomis) dan dibuat dalam sebuah sistem yang benar. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Halim (2012:253) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi daerah yaitu memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan. Hadi (2010) dalam (Nugroho, 2017) mengungkapkan

bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan retribusi.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah, sumber penerimaan dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. PAD dapat diperoleh dengan meningkatkan pendapatan retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lainnya yang merupakan PAD yang sah dan diakui. Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah sangat dipertanyakan keberhasilannya.

Keberhasilan otonomi daerah merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan masing-masing daerah dalam mengembangkan kemajuan pemerintah (Roswaty, 2017). Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki 21 kabupaten dan 1 kota. Pemerintah pusat dan provinsi berperan dalam mendanai kabupaten/kota tersebut dapat dilihat dari dana perimbangan yang ditransfer ke setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk pembiayaan yang didapat langsung dari daerah masing-masing yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1.** Pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	PAD (Miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Alor	45.7	81.9	62.9	50.3	61.3
2	Kabupaten Belu	74.8	101.2	88.5	68.4	85
3	Kabupaten Ende	68.8	95.2	61.2	70	93.9
4	Kabupaten Flores Timur	50.1	57.5	55.6	61.1	52.5
5	Kabupaten Kupang	73.2	119	66.1	62	65.9
6	Kabupaten Lembata	35.7	37.9	42.8	51.7	44.2
7	Kabupaten Malaka	29.2	54.7	41.0	49.1	54.5
8	Kabupaten Manggarai	78.2	128.8	89.9	103.5	96.8
9	Kabupaten Manggarai Barat	91	123.4	103.3	169.9	99.3
10	Kabupaten Manggarai Timur	44.1	85.8	44	54.4	47.5

No	Kabupaten/Kota	PAD (Miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
11	Kabupaten Nagekeo	29.6	46.1	30.8	31	33.1
12	Kabupaten Ngada	47.5	62.3	41.3	51.2	48.7
13	Kabupaten Rote Ndao	28.8	27.9	91	31.3	32.6
14	Kabupaten Sabu Raijua	31.4	47.7	31.1	31.9	36.4
15	Kabupaten Sikka	80.2	118.1	100.8	99.6	119.6
16	Kabupaten Sumba Barat	60.9	85.1	85.1	78.7	78.7
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	99.3	95.9	41.2	48.8	45.7
18	Kabupaten Sumba Tengah	22.1	29.5	28.7	30.4	30.5
19	Kabupaten Sumba Timur	68.2	98.2	75.4	101.4	92.3
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	71.8	189.5	71.5	77.6	64.1
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	48	77.7	51.8	58.7	56.1
22	Kota Kupang	165.4	229.1	171.4	185	167.5
	<i>Average</i>	61.1	90.6	67.1	71.2	68.5
	<i>Maximum</i>	165.4	229.1	171.4	185	147.5

*Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021*

Tabel 1 menggambarkan rata-rata pertumbuhan PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Tahun 2016 rata-rata PAD pada kabupaten/kota Di NTT 61,1 miliar, tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 90,6 miliar,tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 67,1 miliar, tahun 2019

mengalami sedikit kenaikan menjadi 71,2 miliar,turun pada tahun 2020 menjadi 68.5 miliar. Tahun 2016 sampai 2020 daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pendapatan asli daerah yang paling besar adalah Kota Kupang.

**Tabel 2.** Dana perimbangan kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020

No	Kabupaten / Kota	Dana perimbangan (miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Alor	796.8	821.7	873.6	851.4	785.6
2	Kabupaten Belu	676.3	779.2	719.2	743.5	670
3	Kabupaten Ende	883.9	782.9	814.1	934.1	819.9
4	Kabupaten Flores Timur	853.4	742,8	834.4	826.5	775.7
5	Kabupaten Kupang	974.5	869.2	961.3	949.2	848
6	Kabupaten Lembata	585.7	564.1	609.8	693.2	611.3
7	Kabupaten Malaka	539.8	653.6	581.7	625.6	556.4
8	Kabupaten Manggarai	818.6	815	807	880	791.6
9	Kabupaten Manggarai Barat	673.2	694.5	766.7	757.4	722.9
10	Kabupaten Manggarai Timur	691.7	684.2	764.5	7886.7	709.7
11	Kabupaten Nagekeo	611	576.1	559.6	683.9	570.9
12	Kabupaten Ngada	618.7	641.4	590.8	636.9	552.8
13	Kabupaten Rote Ndao	612.5	622.7	673.2	628.6	552.3

No	Kabupaten / Kota	Dana perimbangan (miliar)				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	Kabupaten Sabu Raijua	477.4	427.3	443.9	476.9	479
15	Kabupaten Sikka	872.8	781.7	815.6	896.8	765
16	Kabupaten Sumba Barat	567.9	529.4	623.3	564.7	505.8
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	772.9	653.2	643.3	714.9	646.2
18	Kabupaten Sumba Tengah	469.1	445.3	453.4	494.9	447.8
19	Kabupaten Sumba Timur	897.1	861.8	818.5	935.6	798.1
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	942.4	980.8	1,058.70	1,034.20	977.1
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	757.4	788.4	737.7	847.9	736.5
22	Kota Kupang	926.8	822.6	901.1	874.8	810.6
	<i>Average</i>	728.2	713.3	729.6	765.4	687.9
	<i>Maximum</i>	974.5	980.8	1,058.70	1,034.20	977.1

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021

Tabel 2 menunjukkan rata-rata besaran bantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan yang tidak signifikan yakni pada tahun 2016 sebesar 728.2 miliar, pada tahun 2017 sebesar 713.3 miliar, kemudian terjadi kenaikan untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2018 dengan 729.6 miliar. 2019 sampai tahun 2020 terjadi kenaikan yaitu untuk tahun 2019 sebesar 765.4 miliar dan tahun 2020 sebesar 687.9 miliar. Kabupaten/kota yang memiliki dana perimbangan paling besar dalam tahun 2016 adalah kabupaten kupang dan untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah kabupaten Timor Tengah Selatan.

Data pada Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan adanya ketidakstabilan kemandirian kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengelola keuangannya, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemandirian Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mengelola Keuangannya (Studi Kasus Tahun 2016-2020)”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui tingkat kemandirian kabupaten-kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

dalam mengelola keuangannya berdasarkan laporan keuangan dari tahun 2016–2020; (2) Untuk mengetahui kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi dalam mengelola keuangannya; (3) Untuk mengetahui kabupaten/kota di NTT yang mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah hubungan yang ditentukan berdasarkan kesepakatan kontraktual antara 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu prinsipal dan agen. Teori keagenan menyatakan bahwa agen tidak dapat melakukan pekerjaan atas perintah prinsipal. keagenan memberikan jawaban atas masalah yang muncul antara mitra dengan tujuan dan tugas kerja yang berkurang. Kepala sekolah adalah pihak yang bertanggung jawab memberikan petunjuk untuk pemantauan, evaluasi dan saran atas pekerjaan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Sedangkan prinsipal adalah pihak yang menerima dan melaksanakan pekerjaan di bawah arahan prinsipal. Carr & Brower (2000) dikutip dari Halim dan Abdullah (2006) menyebutkan bahwasanya ada dua pilihan

kontrak dalam bentuk keagenan sederhana yaitu: (1) *Behavior-based*, yaitu prinsipal harus mengawasi tingkah laku agen; (2) *Outcome-based*, yaitu adanya imbalan untuk memberikan semangat agen dalam meraih kepentingan prinsipal. Teori keagenan pada sektor publik dibagi menjadi tiga sistem yang bertingkat yaitu: (1) hubungan keagenan pihak legislatif dan eksekutif; (2) hubungan keagenan pihak legislatif dan publik; (3) hubungan pemerintah pusat dan daerah.

### **B. Otonomi Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 wilayah NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi selanjutnya dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, Otonomi daerah adalah hak, berwenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Daerah (selanjutnya disebut daerah) merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah, yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang mencakup upaya untuk melindungi, melayani memberdayakan, serta mensejahterakan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi (UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2007).

### **C. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Adisasmita (2011) dalam (Roswaty, 2017) mengemukakan bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak lepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang juga dikelola baik dan benar. Pengelolaan keuangan daerah

adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pemantauan keuangan daerah. Pengelolaan juga berfungsi sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kekayaan daerah baik berupa uang atau barang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sistem pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi dua yaitu (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat rencana Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya dalam satu periode akuntansi; (2) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yaitu anggaran yang terealisasi oleh pemda dalam APBD.

### **D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2018) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang berasal dari penerimaan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

### **E. Dana Perimbangan**

Widjaja (2008:129) mengemukakan bahwa Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemda dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana tersebut dialokasikan berdasarkan jenisnya. Dana perimbangan merupakan sumber daya daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014).

**F. Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah**

Dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2011), bersumber dari: (1) Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN; (2) Pemerintah Daerah lain; (3) Lembaga Keuangan Bank; (4) Lembaga Keuangan Bukan Bank; (5) Masyarakat.

**G. Kemandirian Keuangan Daerah**

Halim (2012:232) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah

Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan negara, baik dalam bentuk pembangunan maupun dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat umum. Hubungan antara kemandirian keuangan suatu daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat dan Lainnya}} \times 100\%$$

Adapun skala pengukuran kemandirian keuangan daerah berdasarkan interval sebagai berikut:

**Tabel 3.** Skala interval kemandirian keuangan daerah

Persentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00 %	Sangat kurang
10,01-20,00 %	kurang
20,01-30,00 %	sedang
30,01-40,00 %	cukup
40,01-50,00 %	baik
>50,00 %	sangat baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (2013)

**METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yakni penelitian yang dilakukan terhadap kejadian yang sedang atau telah berlalu.

**Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan APBD dan RAPBD kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun Anggaran 2016-2020 beserta data lainnya yang berkaitan dengan angka dan fenomena yang menunjang penelitian ini. Sumber data adalah data sekunder

**Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah 21 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini menggunakan variabel kemandirian keuangan daerah yang merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah



terhadap dana dari pemerintah pusat maupun provinsi.

**Populasi**

Populasi pada penelitian ini adalah Laporan keuangan 21 Kabupaten dan 1 Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk Tahun anggaran 2016-2020

**Sampel**

Jenis sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel, karena memenuhi syarat yaitu memiliki populasi kurang dari 30.

**Teknik Pengumpulan Data**

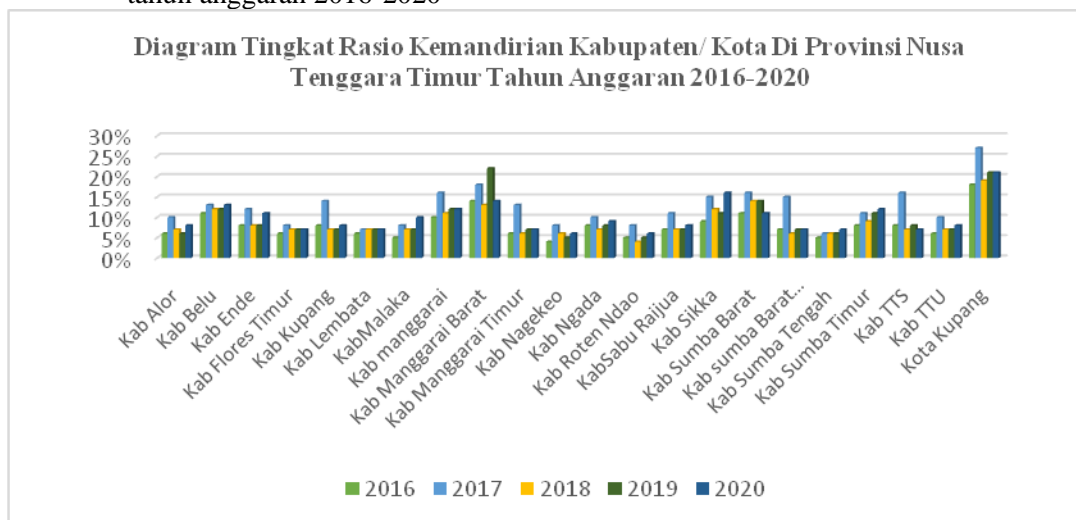
Teknik Pengumpulan Data menggunakan teknik dokumentasi.

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui perhitungan rasio kemandirian daerah dimana kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan daerah, baik dalam bentuk pembangunan maupun dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat umum, yang memberikan kontribusi untuk sumber pajak daerah dan pendapatan asli.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambar 1.** Diagram tingkat rasio kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2016-2020



Sumber: Data diolah, 2022

**HASIL ANALISIS**

Kemandirian kabupaten dan kota yang ada di Nusa tenggara timur tahun anggaran 2016 hanya mencapai kriteria paling tingginya yaitu kriteria “kurang” dengan interval 10,01%-20,00%, banyaknya kabupaten/kota yang dapat mencapai kriteria ini masih belum sebanding dengan kriteria terendahnya yaitu kriteria “sangat kurang” dengan interval 0,00%-10,00%. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kurang adalah 3 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Belu, Manggarai Barat,

Sumba Barat dan Kota Kupang, dengan kemandirian paling tingginya dicapai oleh Kota Kupang dengan persentase 18.18 Kabupaten lainnya berada pada kriteria sangat kurang dimana Kabupaten dengan persentase kemandirian terkecil adalah Kabupaten Nagekeo dengan hanya mencapai 4%. Kemandirian Kabupaten dan Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017 mencapai kriteria yang paling tinggi yaitu kriteria “sedang” dengan interval 20,01%- 30,00 %, yang dicapai oleh Kota Kupang dengan persentase 27% berbeda

dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 yang hanya mencapai kriteria paling tinggi di kriteria “sedang” dan Kota Kupang hanya menempati kriteria “kurang”.<sup>9</sup> Kabupaten yakni Kabupaten Alor, Flores Timur, Lembata, Malaka, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemandirian paling rendah yaitu Sumba Tengah yang hanya mencapai tingkat kemandirian 6%, dan 12 kabupaten lainnya berada pada kriteria “kurang”.

Kemandirian kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018 hanya mencapai kriteria paling tingginya yaitu kriteria “kurang” yaitu dengan interval 10,01%-20,00 %, banyaknya kabupaten/kota yang dapat mencapai kriteria ini pun masih belum sebanding dengan kriteria terendahnya yaitu kriteria “sangat kurang” dengan interval 0,00%-10,00%. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori “kurang” adalah 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Belu, Manggarai, Manggarai Barat, Sikka, Sumba Barat dan Kota Kupang, dengan kemandirian paling tingginya dicapai oleh Kota Kupang dengan persentase 19%. Sedangkan 16 kabupaten lainnya berada pada kriteria “sangat kurang” dimana kabupaten dengan persentase kemandirian terkecil adalah Kabupaten Rote Ndao dengan hanya mencapai 4%.

Kemandirian Kabupaten dan Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019 mencapai kriteria paling tinggi yaitu kriteria “sedang” dengan interval 20,01%-30,00 %, yang dicapai oleh Kota Kupang dengan persentase 21%, dan Kabupaten Manggarai Barat dengan persentase kemandirian sebesar 22%. kabupaten/kota yang masuk dalam kategori sangat kurang adalah 15 Kabupaten dengan kemandirian paling rendah yaitu Kabupaten Nagekeo dan Rote Ndao dengan persentase kemandirian hanya sebesar 5%.

Kemandirian Kabupaten dan Kota yang ada di Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 hanya mencapai kriteria “sedang” dengan interval 20,01%-30,00 %, banyaknya kabupaten/kota yang dapat mencapai kriteria ini pun masih belum

sebanding dengan kriteria terendahnya yaitu kriteria “sangat kurang” dengan interval 0,00%-10,00. Kota Kupang menjadi satu-satunya yang mencapai kriteria “sedang”, sedangkan untuk kriteria “kurang” dicapai oleh 8 Kabupaten yakni Kabupaten Belu, Ende, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Sikka, Sumba Barat dan Sumba Timur, sedangkan lebih dari setengah kabupaten yang ada yakni 13 kabupaten berada pada kriteria “sangat kurang”, dengan tingkat kemandirian terendah dicapai oleh Kabupaten Rote Ndao dengan hanya mencapai 6%.

## PEMBAHASAN

Menurut kajian ekonomi dan keuangan regional NTT yang dibuat oleh Bank Indonesia (2017) 6 hal (permasalahan dan potensi ekonomi) yang dapat menghambat perekonomian NTT, diantaranya: 1) kurangnya kualitas sdm, 2) kurangnya akses listrik, 3) kurangnya akses air, 4) permasalahan pembebasan lahan, 5) permasalahan akses jalan dan 6) potensi pariwisata sebagai alternatif pendorong ekonomi di Provinsi NTT. Rendahnya kualitas SDM sendiri terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT yang berada di peringkat ke-32 dari 34 Provinsi di Indonesia. Di sisi lain, tenaga kerja di NTT juga masih didominasi oleh tingkat Sekolah Dasar ke bawah (>60%). Hal ini juga tergambar dari tingginya tingkat partisipasi murni sekolah untuk tingkat SD yang mencapai 94,56%. Sementara itu tingkat SMP baru mencapai 65,86% dan SMA (52,15%). Konsentrasi tenaga kerja yang berada di sektor pertanian sehingga tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab.

Menurut kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020 yang dipublikasi oleh (Bank Indonesia, 2021) Selama tahun 2020 Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,83% (ctc), lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,24% (ctc), namun lebih tinggi

dibanding nasional yang berkontraksi 2,07% (ctc). Seluruh komponen di sisi pengeluaran mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi COVID-19. Kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh konsumsi rumah tangga yang ditopang dengan adanya program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memulihkan daya beli masyarakat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kontraksi lebih dalam tertahan oleh LU Informasi dan Komunikasi, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Jasa Keuangan dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah serta meningkatnya transaksi elektronik masyarakat mendorong pertumbuhan LU Informasi dan Komunikasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,27% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi triwulan III 2020 sebesar 1,75% (yoy). Penurunan kinerja perekonomian pada triwulan IV 2020 terutama bersumber dari perlambatan investasi dan konsumsi rumah tangga seiring refocusing dan realokasi anggaran pemerintah serta kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dari sisi LU, melambatnya kinerja ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV 2020 terutama bersumber dari perlambatan LU Konstruksi dan LU Perdagangan Besar dan Eceran. Perlambatan ekonomi di triwulan laporan tertahan oleh masih meningkatnya kinerja LU Pertanian kehutanan, dan perikanan seiring masa panen komoditas perkebunan, namun adanya perlambatan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen sisi pengeluaran sebagai dampak pandemi COVID-19. Kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh konsumsi rumah tangga yang ditopang dengan adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memulihkan daya beli

masyarakat. Dari sisi LU, kontraksi lebih dalam tertahan oleh LU Informasi dan Komunikasi, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; LU Jasa Keuangan dan Asuransi; dan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu tumbuh positif di tengah pandemi COVID-19.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Tingkat kemandirian kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur menggunakan rasio kemandirian pada tiap-tiap daerah selama tahun anggaran 2016 sampai 2020, belum mandiri bahkan belum menyentuh setengah dari tingkat kemandirian tertinggi, terbukti dengan hanya ada Kota Kupang yang selama tiga tahun berada pada kriteria yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur, itu pun hanya mencapai kriteria sedang yang intervalnya 20,01%-30%. Sejalan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata ketergantungan kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Timur terhadap pendapatan transfer dari pemerintah dan lainnya masih sangat tinggi, dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya sendiri, bahkan rata-rata dari pendapatan asli daerah di dapatkan oleh masing-masing kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur masih sangat kecil dan tidak mencapai setengah atau bahkan 10% dari pendapatan transfer dari pemerintah dan lain-lain.

2. Diantara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah yang mempunyai tingkat kemandirian yang cukup tinggi dalam mengelola keuangannya adalah Kota Kupang. Sejalan dengan anggaran pendapatan asli Daerah Kota Kupang sepanjang tahun 2016 sampai 2020 merupakan yang paling tinggi diantara Kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Daerah yang berbentuk kabupaten ada Kabupaten Manggarai Barat yang pada tahun 2019 mampu mencapai kriteria yang

sama dengan Kota Kupang yaitu pada kriteria sedang.

3. Diantara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, daerah yang mempunyai tingkat ketergantungan paling tinggi terhadap penerimaan keuangan dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Rote Ndao. Dengan tingkat kemandirian paling rendah ada pada tahun 2016 yang dicapai oleh Kabupaten Nagekeo dengan persentase sebesar 4%, menjadi yang paling rendah sepanjang tahun 2016 sampai 2020, Kabupaten Nagekeo juga selalu berada pada kriteria paling rendah bahkan kemandirian paling tinggi yang bisa dicapai oleh Kabupaten Nagekeo ada pada tahun 2017 dengan hanya mencapai 8%.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2021). *Kajian ekonomi dan keuangan regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Februari 2018*.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Jakarta:Salemba Empat,hal.L2-L13
- Nugroho, P. (2017). Analisis Atas Kemandirian Pemda Dalam Mengelola Keuangannya. *Info Artha*, 5, 93–106. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.64>

#### Saran

##### 1. Bagi Objek Penelitian

Perlunya upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam hal kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka diperlukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengelola sumber daya asli daerah secara maksimal.

##### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah sumber data bagi penelitian bukan hanya menggunakan data sekonderr yang berbentuk data keuangan, namun juga dapat mendapatkan data seperti wawancara, kuesioner dan *survey*.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (2019).
- Prof. Dr.Haw Widjaja. (2008). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Roswaty. (2017). Analisis Kemandirian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(01), 21–27.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (2014).

**PENGARUH LABA KOTOR, LABA OPERASI DAN LABA BERSIH DALAM  
MEMPREDIKSI ARUS KAS DI MASA MENDATANG  
(STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI  
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019)**

**Maria Arnita Herawati Garum**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
arnitagarum@gmail.com

**Yohanes Demu**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
yohanes.demu@staf.undana.ac.id

**Maria Indriyani Hewe Tiwu**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
indrianitiwu@staf.undana.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjelaskan pengaruh laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah 49 perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan program Eviews 9. Hasil analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa laba kotor secara parsial tidak berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang, laba operasi secara parsial berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang, laba bersih secara parsial berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Sedangkan secara simultan menyatakan bahwa laba kotor, laba operasi dan laba bersih mempunyai pengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.

**Kata Kunci:** *Laba Kotor, Laba Operasi, Laba Bersih dan Arus Kas*

**ABSTRACT**

*This study was conducted with the aim of explaining the effect of gross profit, operating profit and net profit in predicting future cash flows in mining companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The population in this study were 49 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The sampling technique in this study used purposive sampling so that the sample in this study was 13 mining companies on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019. The data analysis technique uses panel data regression with the Eviews 9 program. The results of data analysis in this study show that gross profit partially has no effect on predicting future cash in predicting future cash flows, operating profit partially has an effect on predicting future cash flows, net income partially influential in predicting future cash flows. Meanwhile, the result of the study also shows that simultaneously gross profit, operating profit and net income have an influence in predicting future cash flows.*

**Keyword:** *Gross Profit, Operating Profit, Net Profit and Cash Flow*

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan perekonomian setiap perusahaan yang tumbuh

dan berkembang dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan seluruh aktivitasnya agar mampu bersaing dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat

tercapai yaitu mendapatkan laba. Untuk melihat kinerja perusahaan dalam suatu periode dapat tercermin dengan menganalisis dari laporan keuangan perusahaan. Laporan Keuangan adalah sebuah struktur yang menyediakan informasi terkait posisi keuangan dan kinerja keuangan pada sebuah entitas. Laporan keuangan ini mempunyai tujuan umum untuk melihat posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flows*) dari sebuah entitas yang sangat berguna untuk membuat dan pengambilan keputusan ekonomi bagi para pengguna laporan keuangan (IAI, 2012:5). Laporan keuangan juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yaitu menentukan keputusan apa yang akan dibuat oleh entitas di masa sekarang maupun di masa depan, dengan memperhatikan kondisi yang ada, jika itu kelemahan atau keunggulan yang diperoleh entitas. Laporan keuangan juga mempunyai peranan penting bagi pihak eksternal seperti investor sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam membuat dan mengambil keputusan investasi dan menilai tentang prospek arus kas sebuah perusahaan. Sehingga para investor dapat menilai seberapa besar atau kecil jumlah arus kas yang dimiliki oleh entitas dalam melaksanakan kegiatan operasional sebuah entitas. Laporan keuangan sendiri terdiri dari beberapa macam seperti: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Adapun salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi-informasi yang sangat membantu para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditor dalam memprediksi jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas di masa depan adalah laporan laba rugi (Kieso et al., 2017:181) Laporan laba rugi adalah laporan yang menyatakan jumlah penghasilan atau pendapatan yang didapatkan perusahaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan serta kondisi laba atau rugi dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2017:81) Laporan laba rugi menyajikan informasi terkait laba kotor, laba operasi dan laba bersih yang bermanfaat bagi investor untuk memberi keyakinan bahwa laba

merupakan sumber informasi untuk memprediksi arus kas.

Berikut jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019 :

**Tabel 1.** Perusahaan pertambangan di BEI tahun 2017-2019

No	Sub perusahaan pertambangan	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Sektor Batubara	24	25	24
2.	Sektor minyak mentah dan gas bumi	9	10	11
3.	Sektor logam dan mineral	10	10	12
4.	Sektor tanah dan batu galian	2	2	2
<b>Jumlah Perusahaan</b>		<b>45</b>	<b>47</b>	<b>49</b>

Sumber : diolah peneliti (2021)

Tabel 1 menyatakan bahwa Bursa Efek Indonesia membagi perusahaan pertambangan menjadi empat bagian yaitu sektor batubara, sektor minyak mentah dan gas bumi, sektor logam dan mineral, dan sektor tanah dan batu galian. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa jumlah perusahaan pertambangan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penambahan perusahaan. Penambahan ini sebanyak empat perusahaan meliputi 2 dari sektor minyak mentah dan gas bumi dan 2 dari sektor logam dan mineral. Perusahaan sektor batubara mengalami penambahan satu perusahaan pada tahun 2018 dan kembali berkurang pada tahun 2019. Sedangkan untuk perusahaan di sektor tanah dan batu galian tidak terjadi penambahan selama tahun 2017 sampai 2019. Penambahan ini terjadi karena banyak perusahaan ingin mendapat keuntungan terutama dalam membuka akses terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Melalui bursa efek Indonesia perusahaan-perusahaan bisa mendapatkan pendanaan dari penjualan saham kepada publik dan keuntungan lainnya adalah dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga dapat menarik para investor untuk bekerjasama.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada perusahaan pertambangan karena di Indonesia sendiri investasi yang paling memiliki prospek

adalah pada investasi di bidang pertambangan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah yang dibuktikan dengan negara Indonesia sebagai negara yang berada diperingkat atas sebagai negara yang memproduksi sumber daya alam terbanyak.

Berdasarkan data perkembangan laba kotor, laba operasi, laba bersih serta arus kas pada sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019 dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuatif yang signifikan pada angka laba kotor, laba operasi, laba bersih dan arus kas perusahaan dimana masing-masing perusahaan terjadi peningkatan dan penurunan. Beberapa perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga mengalami rugi selama periode selama tahun 2017-2019. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adalah harga pokok penjualan mengalami naik turun, persaingan yang ketat antara perusahaan sejenis dan juga karena kinerja masing-masing perusahaan.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan pengaruh laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019. Penelitian ini juga mempunyai manfaat sebagai sumber informasi tambahan bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terkait pengaruh laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.

## **KAJIAN TEORI**

### **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang menyatakan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu (Kasmir, 2017:66). Berikut ini tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan dalam kerangka Konseptual FASB dalam Suwardjono, (2016:157) yaitu :

- a. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditur dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam membuat keputusan-keputusan

investasi, kredit dan semacamnya yang rasional. Informasi harus dipahami bagi mereka yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan bisnis dan ekonomi dan bersedia untuk mempelajari informasi dengan cukup tekun

- b. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditur dan pemakai lain, baik berjalan maupun potensial, dalam menilai (*assessing*) jumlah, saat terjadi dan ketidakpastian penerimaan kas mendatang (*prospective cash receipts*) dari dividen atau bunga dan pemerolehan kas (*proceeds*) mendatang dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman. Dengan cara lain, pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditur dan pemakai lain dalam menilai (*assessing*) jumlah, saat terjadi dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha bersangkutan
- c. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, terhadap sumber-sumber tersebut (kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomi ke entitas lain dan ekuitas pemilik) dan akibat-akibat dari transaksi, kejadian dan keadaan yang mengubah sumber daya badan usaha dan klaim terhadap sumber daya tersebut.

### **Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi menyediakan informasi yang membantu investor dan kreditur dalam memprediksikan jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Masyarakat bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi dan kelayakan kredit (Kieso et al., 2017:181).

### **Laba Akuntansi**

Laba merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual.

Pengertian laba yang seperti ini akan memudahkan pengukuran dan pelaporan laba secara objektif. Laba akuntansi dari kacamata perekayasa akuntansi atau satuan usaha karena keperluan untuk menyajikan informasi secara objektif dan terandalkan. Oleh karena itu laba akuntansi didasarkan pada data yang telah yang telah terjadi bukannya data hipotesis yang dapat berupa *opportunity cost* (Suwardjono, 2016:456).

### **Jenis-Jenis Laba**

#### **Laba Kotor**

Laba kotor usaha yaitu laba yang diperoleh sebelum diperhitungkan beban-beban usaha, atau merupakan selisih lebih pendapatan bersih usaha dengan harga pokok penjualan (Syakur, 2009:31). Laba kotor mencerminkan profitabilitas barang dagangan suatu perusahaan. Laba kotor sangat penting bagi para manajemen dan pihak lain untuk membandingkan angka laba kotor dengan tahun lalu, bahkan dalam hal tertentu dibandingkan dengan persentase laba kotor perusahaan pesaing serta laba kotor industri, sehingga dapat menilai efektivitas fungsi pembelian dan kebijakan penetapan harga jual (Haryono, 2017:376)

#### **Laba Operasi**

Laba operasi adalah selisih laba kotor dengan biaya-biaya operasi. Biaya-biaya operasi adalah biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan atau biaya-biaya yang sering terjadi didalam perusahaan dan bersifat operatif (Suprpto, 2013:4)

#### **Laba bersih**

Laba bersih (*Net Profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu termasuk pajak (Kasmir dalam Alamsyah dkk, 2019:4) Laba bersih dihasilkan dari selisih antara seluruh pendapatan dari suatu kegiatan operasi maupun yang non operasi perusahaan (Suprpto, 2013:4).

#### **Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas (*statement of cash flows*) merupakan laporan yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar utama dari sebuah perusahaan selama periode tertentu (Warren et al., 2014:786). Beberapa kegunaan dari laporan arus kas bagi para investor,

kreditur dan pihak lainnya (Kieso et al., 2018:591) :

1. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas masa depan
2. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan melunasi kewajiban
3. Alasan perbedaan antara laba neto dan arus kas neto dari aktivitas operasi
4. Transaksi kas dan non kas atas investasi dan pendanaan selama periode berjalan

Pengklasifikasikan laporan arus kas berupa penerimaan kas dan pembayaran kas sebagai berikut (Kieso et al., 2018:592) :

1. Aktivitas operasi (*operating activities*)
2. Aktivitas investasi (*investing activities*)
3. Aktivitas pendanaan (*financing activities*)

#### **Hipotesis**

Adapun beberapa hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **Laba Kotor dengan Arus Kas di masa Mendatang**

Laba kotor menyediakan informasi terkait penjualan serta harga pokok penjualan yang bermanfaat bagi sebuah perusahaan dalam mengevaluasi kinerjanya. Penjualan yang terjadi secara kredit oleh sebuah perusahaan dapat menyatakan terjadi kemungkinan adanya kas masuk yang diperoleh perusahaan di masa mendatang. Sehingga hal ini dapat menyatakan bahwa laba kotor bisa saja berkemungkinan dapat mempengaruhi arus kas di masa mendatang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Yunita pada tahun 2020 menemukan bahwa laba kotor berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang (Maharani, 2020:11). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H1 : diduga Laba kotor berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang

#### **Laba Operasi dengan Arus Kas di masa Mendatang**

Laba operasi didapat dari selisih antara laba kotor dengan berbagai biaya operasi perusahaan. Laba operasi juga mempunyai kemungkinan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang karena laba operasi mempunyai keterkaitan secara langsung dalam



proses penentuan laba perusahaan karena biaya operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Penelitian Koeswardhana yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan bahwa laba operasi mempunyai kemampuan signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang (Koeswardhana, 2020:7).

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H2 : diduga laba operasi berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang

#### **Laba Bersih dengan Arus Kas di masa Mendatang**

Laba bersih adalah peningkatan bersih terhadap modal perusahaan yang didapat dari perbandingan lebih dari pendapatan terhadap beban-beban perusahaan. Laba bersih dapat menjadi salah satu faktor dalam memprediksi arus kas di masa depan karena pada laba bersih yang mempunyai sifat akrual yang didapatkan dari laba sebelum pajak dan juga pendapatan lain-lain misalnya pendapatan bunga. Dimana pendapatan dari bunga diperoleh oleh perusahaan terjadi pada saat angsuran pokok dari pinjaman sebagiannya dibayar dimuka sehingga itu akan berpengaruh pada pemasukan terhadap bunga di masa mendatang.

Penelitian Suprpto yang dilakukan pada tahun 2013 mengenai informasi laba dalam memprediksi arus kas di masa mendatang dengan hasil penelitian menunjukkan laba bersih mempunyai pengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang (Suprpto, 2013:13). Berdasarkan uraian tersebut diatas hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H3 : diduga laba bersih berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang

#### **Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih dengan Arus Kas di masa Mendatang**

Laba berkepentingan untuk memberikan keyakinan bahwa laba merupakan sumber untuk memprediksi arus kas bagi para investor. Laba akuntansi memiliki informasi yang sangat berguna terhadap para investor dan juga dalam pengendalian manajemen perusahaan. Menurut PSAK No.25 informasi

yang disajikan dalam laporan laba rugi sering dipakai perusahaan dalam memprediksi sejauh mana kemampuan setiap perusahaan dalam mendapatkan arus kas serta aktiva lain yang dapat disamakan dengan kas di masa mendatang.

Hasil penelitian Koeswardhana yang dilakukan pada tahun 2020 menjelaskan secara simultan laba kotor, laba operasi dan laba bersih mempunyai kemampuan memprediksi arus kas di masa mendatang (Koeswardhana, 2020:8). Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan maka hipotesis sebagai berikut

H4 : diduga laba kotor, laba operasi dan laba bersih berpengaruh untuk memprediksi arus kas di masa mendatang

### **METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif dengan pendekatan Asosiatif Kausal. Jenis penelitian asosiatif kausal artinya menggambarkan dan menguji hipotesis hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017:23).

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, jenis penelitian asosiatif kausal akan menjelaskan hubungan antara variabel independen yaitu laba kotor laba operasi dan laba bersih terhadap variabel dependen yaitu arus kas di masa mendatang.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini jenis data kuantitatif yang digunakan adalah data dari laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi yang meliputi laba kotor, laba operasi dan laba bersih serta data dari laporan arus kas Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Sedangkan data kualitatif berupa data informasi terkait profil perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang

meliputi laporan laba rugi yang menyajikan laba kotor, laba operasi dan laba bersih dan laporan arus kas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

#### Definisi Operasional Variabel Penelitian

Beberapa operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Laba Kotor (X1)  
Laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan
2. Laba Operasi (X2)  
Laba operasi merupakan laba yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan
3. Laba Bersih (X3)  
Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban Perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak
4. Arus Kas (Y)  
Laporan arus kas (*statement of cash flows*) merupakan laporan yang melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar utama dari sebuah perusahaan selama periode tertentu

#### Populasi dan Sampel

##### Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah 49 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada periode pengamatan tahun 2017-2019.

##### Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Sampling Purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:144). Penentuan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian yang dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan laba rugi dan laporan arus kas selama tahun 2017-2019
2. Perusahaan pertambangan yang menyatakan kondisi laba pada angka laba kotor, laba operasi, laba bersih dan arus kas selama tahun 2017-2019.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diatas maka sampel penelitian ini terdiri dari 13 perusahaan.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi.

#### Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan program komputer Eviews 9. Dengan model sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \beta_3 X_{it} +$$

- a. Uji Asumsi Klasik  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas
- b. Uji Hipotesis
  - a) Uji parsial

Dasar pengambilan keputusan dalam uji parsial (t) adalah dengan membandingkan nilai probabilitas dan membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak sedangkan jika nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai t-hitung > t-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima sedangkan jika nilai t-hitung < t-tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak.

- b) Uji Simultan (F)

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Simultan (F) adalah dengan membandingkan nilai probabilitas dan membandingkan F-hitung dengan F-tabel. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak sedangkan jika nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai F-hitung > F-tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima sedangkan jika nilai F-hitung < F-tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak.

- c) Uji Koefisien Determinasi (R2)

Nilai dari koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. R2= 0 maka variasi variabel bebas yang digunakan

dalam model mampu menjelaskan variabel terikat.  $R^2 = 1$  maka variasi variabel bebas yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel terikat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Analisis Regresi Data Panel

Hasil pengujian pemilihan model regresi data panel sebelumnya yaitu hasil uji Chow dan uji Hausman maka model yang paling baik digunakan dalam penelitian ini adalah model Fixed Effect. Berikut hasil uji Fixed Effect;

**Tabel 2.** Hasil uji fixed effect model

Variable	Coefficient	Prob.
C	1.59E+12	0.0004
X1	-0.035209	0.8895
X2	-1.975012	0.0376
X3	2.946912	0.0170

Sumber: *Output eviws 9, diolah peneliti, (2021)*

Berdasarkan tabel 2 terkait hasil uji Fixed Effect dimasukan ke dalam model regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_{ndnit} + \epsilon_{it}$$

$$\text{Arus kas di masa mendatang} = 1,59 - 0,03X_{1it} - 1,97X_{2it} + 2,94X_{3it} + \epsilon_{it}$$

#### Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Multikolinearitas

**Tabel 3.** Hasil uji multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.955035	0.827213
X2	0.955035	1.000000	0.938869
X3	0.827213	0.938869	1.000000

Sumber: *Output eviws 9, diolah peneliti (2021)*

Berdasarkan tabel 3 nilai korelasi antara variabel independen kurang dari 0,95. Sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas yang serius dalam penelitian ini.

##### 2. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4.** Hasil uji heteroskedastisitas  
Heteroskedasticity test : glejser

Prob. Chi-Square Obs\*R-squared | 0.4770

Sumber: *Output eviws 9, diolah peneliti, (2021)*

Berdasarkan tabel 4 diatas nilai probabilitas Obs\*R-squared menyatakan lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas

#### Hasil Uji Statistik

##### 1. Uji Parsial

**Tabel 5.** Hasil Uji t

Variable	t-Statistic	Prob.
X1	-0.140477	0.8895
X2	-2.206833	0.0376
X3	2.573007	0.0170

Sumber: *Output eviws 9, diolah peneliti, (2021)*

##### a. Laba Kotor

Berdasarkan hasil estimasi uji parsial nilai probabilitas yang ditampilkan dalam tabel 5 yaitu sebesar 0,8895 menyatakan bahwa nilai estimasi probabilitas variabel laba kotor lebih dari (>) 0,05. Jika dilihat dari nilai t-hitung untuk variabel X1 yaitu sebesar 0.140477 sedangkan untuk t-tabel yaitu sebesar 2.03011. Sehingga hasil pengujian yang sesuai dengan kriteria yaitu  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  (0.140477 < 2.03011). Berdasarkan hasil pengujian diatas dengan menggunakan kriteria nilai probabilitas t-hitung dan nilai t-hitung maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini berarti laba kotor tidak berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

##### b. Laba Operasi

Hasil estimasi uji parsial yang ditampilkan dalam tabel 5 menyatakan nilai Probabilitas sebesar 0,0376 artinya bahwa nilai estimasi probabilitas variabel Laba Operasi < 0,05. Berdasarkan hasil nilai t-hitung untuk variabel X2 yaitu sebesar 2.206833 sedangkan untuk t-tabel yaitu sebesar

2.03011. Sehingga hasil pengujian yang sesuai dengan kriteria menyatakan bahwa  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $2.206833 > 2.03011$ ). Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan kriteria nilai probabilitas  $t\text{-hitung}$  dan nilai  $t\text{-hitung}$  maka disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga hipotesis yang diterima adalah laba operasi berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019

c. Laba Bersih

Berdasarkan tabel 5 terkait hasil estimasi uji parsial menyatakan bahwa nilai estimasi probabilitas sebesar 0,0170 artinya nilai estimasi probabilitas variabel laba bersih  $< 0,05$ . Berdasarkan hasil nilai  $t\text{-hitung}$  untuk variabel X3 yaitu sebesar 2.573007 sedangkan untuk  $t\text{-tabel}$  yaitu sebesar 2.03011. Sehingga hasil pengujian yang sesuai dengan kriteria menyatakan bahwa  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $2.57300 > 2.03011$ ). Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan kriteria nilai probabilitas  $t\text{-hitung}$  dan nilai  $t\text{-hitung}$  maka disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sama seperti laba operasi  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga hipotesis yang diterima adalah laba operasi berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019

2. Uji Simultan (F)

**Tabel 6** Hasil uji F

Variabel	F-hitung	Prob. F-hitung
Laba Kotor (X1), Laba Operasi (X2), Laba Bersih (X3)	38.02003	0.00000

Sumber : diolah peneliti (2021)

Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui nilai F-hitung untuk variabel laba kotor, laba operasi dan laba bersih yaitu sebesar 38.02003 dengan nilai yang diperoleh dari F-tabel sebesar 2.87.

Sehingga hasil pengujian yang sesuai dengan kriteria menyatakan bahwa  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  ( $38.02003 > 2.87$ ). Sedangkan berdasarkan pengujian nilai probabilitas F-hitung prob ( $F\text{-statistic}$ ) sebesar 0,0000 atau kurang dari taraf signifikan 0,05 ( $0.0000 < 0.05$ ). Sehingga berdasarkan hasil pengujian menggunakan kriteria nilai F-tabel dan nilai probabilitas F-hitung maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga hasil uji F dalam penelitian ini bahwa laba kotor, laba operasi dan laba bersih berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 7** Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )

R-squared	0.961234
Adjusted R-squared	0.935952

Sumber : output Eviews 9, diolah Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 7 diatas terlihat bahwa Adjusted R-squared sebesar 0,935952 atau sebesar 93% yang mempunyai arti bahwa variabel dependen ( arus kas di masa mendatang) dapat dijelaskan oleh variabel independen (laba kotor, laba operasi dan laba bersih) sebesar 93% sedangkan sisanya ( $100\% - 93\% = 8\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Artinya bahwa tidak hanya laba kotor, laba operasi dan laba bersih yang dapat menjelaskan variasi perubahan pada variabel arus kas di masa mendatang tetapi masih banyak variabel independen lain yang dapat menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen ( arus kas di masa mendatang) yang peneliti tidak masukan dalam penelitian ini.

**Pembahasan**

1. Laba Kotor Terhadap Arus Kas di masa Mendatang

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam uji parsial (t) variabel laba kotor tidak berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan

Pertambahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi penyebab laba kotor tidak berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan Pertambahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yaitu karena laba kotor sendiri tidak mempunyai kaitan langsung dengan proses operasi perusahaan sehingga tidak mempunyai keterkaitan terhadap penciptaan laba dimana laba kotor ini belum memperhitungkan beban operasi pada perusahaan yang mampu mempengaruhi secara langsung terhadap kegiatan operasi dari sebuah perusahaan. Beban operasi itu sendiri merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau biaya-biaya yang biasa terjadi dalam sebuah perusahaan (Suprpto, 2013:4). Hal ini mendukung teori dari Kasmir yang mengatakan bahwa laba yang didapatkan sebelum dikurangkan dengan biaya yang menjadi beban perusahaan adalah laba kotor (Kasmir, 2017:303) dan juga teori yang dikemukakan oleh Haryono yang menyatakan bahwa pada laba kotor belum menggambarkan profitabilitas atau keuntungan secara keseluruhan disebabkan karena laba kotor ini belum dikurangkan dengan beban operasi pada perusahaan sedangkan laba kotor hanya menggambarkan profitabilitas barang dagangan perusahaan itu sendiri (Haryono, 2017:376). Sedangkan laba kotor sendiri dipengaruhi Harga Pokok Penjualan yang mempunyai kaitan langsung terhadap penjualan itu sendiri. Penentuan beban Pokok Penjualan perusahaan pada setiap perusahaan pertambahan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia bervariasi tergantung berbagai kebijakan dalam menentukan dan menilai beban pokok penjualan yang mengakibatkan pada laba kotor yang fluktuatif.

Adapun fenomena yang terjadi yang menjadi penyebab variasinya kebijakan perusahaan dalam menentukan harga pokok penjualan yaitu salah satunya pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi selama periode pengamatan. Pelemahan nilai tukar

Rupiah ini terjadi karena resiko dari akibat ketidakpastian yang terjadi pada pasar keuangan dunia. Hal ini disebabkan oleh dampak normalisasi kebijakan moneter AS dan juga dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan impor yang mengalami peningkatan cukup besar serta untuk keperluan pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo. Dampak dari melemahnya nilai Rupiah ini memberikan pengaruh terhadap peningkatan terhadap harga barang akibat dari bahan baku produk impor pada produk dalam negeri. Kondisi pelemahan nilai tukar Rupiah ini menjadi salah satu faktor penyebab perbedaan harga pokok penjualan pada setiap perusahaan pertambahan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019.

Klasifikasi arus kas sendiri dibagi menjadi tiga yaitu klasifikasi dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan (Kieso et al., 2018:592). Dari ketiga klasifikasi tersebut aktivitas operasi mempunyai keterkaitan dengan laba kotor dimana laba kotor didapatkan dari hasil penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Dalam aktivitas operasi juga terdapat transaksi misalnya penerimaan kas dari hasil penjualan barang atau jasa dan transaksi dalam mendapatkan persediaan yaitu terjadi pengeluaran maupun pembayaran kas terhadap pemasok maupun biaya terhadap karyawan yang juga mampu mempengaruhi penjualan bersih dalam perusahaan. Sedangkan aktivitas investasi dan juga pada aktivitas pendanaan tidak mempunyai keterkaitan kuat dengan laba kotor karena aktivitas investasi diperoleh dari hasil penjualan terhadap aset tetap yang dimiliki perusahaan, kegiatan investasi dan juga aset tak berwujud. Arus kas keluar terjadi ketika adanya pembayaran untuk memperoleh aset tetap. Berdasarkan aktivitas pendanaan diperoleh dari hasil penerbitan terhadap surat-surat berharga utang jangka panjang maupun ekuitas. Sehingga dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan tidak terlalu mempunyai komponen dalam penentuan laba kotor.

Perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia adalah perusahaan dengan pengaruh yang tinggi terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan ekonomi, hal ini karena menjadi perusahaan pertambangan menjadi penyedia sumber daya energi dari minyak dan gas bumi, logam dan mineral, batubara dan batu-batuan yang membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karakteristik industri pertambangan memiliki perbedaan dengan industri pada sektor lain karena pada perusahaan pertambangan membutuhkan biaya terhadap investasi yang sangat besar, sarat resiko, berjangka panjang dan adanya ketidakpastian yang tinggi. Sehingga dari hal-hal tersebut dapat menjadi faktor laba kotor tidak berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang karena jika dilihat dari informasi yang disajikan dalam laba kotor hanya memuat informasi tentang profitabilitas barang dagangan perusahaan, sedangkan dalam perusahaan pertambangan memiliki karakteristik yang berisiko tinggi dan biaya investasi yang besar serta mempunyai ketidakpastian tinggi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil Koeswardhana (2020) yang meneliti terkait kemampuan laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Hasil penelitian Koeswardhana ini menyatakan bahwa laba kotor tidak mempunyai kemampuan signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadila, (2018) yang menguji terkait pengaruh laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Hasil penelitiannya menyatakan laba kotor secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang.

Hasil penelitian ini juga berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu Alamsyah dan Shodiq (2019) yang menguji pengaruh

laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang studi empiris pada perusahaan manufaktur di BEI. Hasil penelitian menyatakan bahwa laba kotor berpengaruh positif terhadap arus kas di masa mendatang. Penelitian lain yang berlawanan dengan penelitian ini adalah Maharani (2020) dan Suprpto (2013) dengan hasil penelitian bahwa laba kotor berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.

## **2. Laba Operasi Terhadap Arus Kas Di masa Mendatang**

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam uji Parsial (t) laba operasi mampu memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia selama tahun 2017-2019.

Hasil penelitian ini mendukung terkait teori selisih antara laba kotor dengan biaya-biaya operasi itu merupakan laba operasi. Biaya-biaya operasi merupakan biaya yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan operasi pada sebuah perusahaan maupun biaya yang biasa terjadi dalam sebuah perusahaan dan mempunyai sifat operatif (Suprpto, 2013:4). Teori ini memperkuat hasil penelitian ini dimana laba operasi mempunyai pengaruh untuk memprediksi perkembangan arus kas di masa mendatang yang terjadi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hal ini karena laba operasi sendiri merupakan hasil dari operasi normal perusahaan yang sedang berlangsung. Laba operasi sendiri dapat menggambarkan tentang operasi utama dalam sebuah perusahaan dan juga mempunyai kaitan langsung dalam proses terjadinya laba melalui biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasi perusahaan. Laba operasi juga dapat mendukung terkait aktivitas atau kegiatan utama perusahaan. Sehingga laba operasi ini dapat mempengaruhi keadaan arus di masa mendatang. Melalui laba operasi para pihak pemakai laporan keuangan juga mampu membandingkan efisiensi Perusahaan dengan perusahaan lain dalam menjalankan

operasi perusahaan. Dimana jika biaya operasi perusahaan besar hal itu menyatakan bahwa perusahaan mampu memahami dan mengetahui terhadap perkembangan kondisi perusahaan serta mengatasi kesulitan pada perusahaan. Artinya bahwa setiap perusahaan dapat menginvestasikan melalui biaya operasi perusahaan untuk keberhasilan perusahaan di masa depan. Sehingga laba operasi ini dapat mempengaruhi arus kas di masa mendatang. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Koeswardhana (2020) yang menganalisis kemampuan laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang dengan hasil laba bersih mempunyai kemampuan signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Penelitian lain dilakukan oleh Maharani (2020) dengan judul penelitian model prediksi arus kas di masa depan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa laba operasi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Penelitian lain dilakukan oleh Suprpto (2013) dengan judul informasi laba dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa laba operasi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.

Hasil penelitian terdahulu yang berlawanan dengan penelitian ini adalah Fadila (2018) yang meneliti tentang pengaruh laba kotor, laba operasi dan laba bersih dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Hasil penelitian Fadila menyatakan bahwa laba operasi secara parsial tidak berpengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.

### **3. Laba Bersih Terhadap Arus Kas Di masa Mendatang**

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam uji parsial (t) laba bersih mampu memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan Pertambangan yang

terdaftar di Bursa efek Indonesia selama tahun 2017-2019.

Terjadinya laba bersih dalam satu perusahaan dapat menyatakan kondisi kesuksesan operasi pada perusahaan selama periode waktu tertentu. Keberhasilan ini mampu menarik minat para investor untuk bekerjasama dan menanamkan modal mereka pada perusahaan sehingga mampu meningkatkan arus kas di masa depan. Pada penelitian ini perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yang dijadikan sampel yaitu perusahaan-perusahaan yang mengalami kondisi laba selama tahun pengamatan, sehingga laba bersih perusahaan mampu memprediksi kondisi arus kas di masa mendatang pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Penjelasan di atas mendukung teori yang dikemukakan oleh (Kieso et al., 2017:181) dimana selama periode waktu tertentu keberhasilan dari operasi perusahaan dapat diukur melalui laporan laba rugi perusahaan. Dalam laporan laba rugi juga menyajikan informasi yang membantu pihak investor maupun kreditur dalam memperkirakan jumlah, waktu dan adanya ketidakpastian arus kas di masa depan. Selain itu, pendapatan-pendapatan lain dalam laba bersih yang menggunakan akuntansi akrual seperti pendapatan bunga yang dilakukan secara kredit dapat menyebabkan arus kas keluar dan arus kas masuk di masa depan. Hal ini terjadi ketika pendapatan dari bunga yang didapat perusahaan pada saat angsuran pokok dari pinjaman sebagiannya dibayar dimuka sehingga akan berpengaruh pada pemasukan terhadap bunga pada masa mendatang. Hal ini mendukung hasil penelitian dari Suprpto tahun 2013 yang mengemukakan bahwa laba bersih diperoleh dari perbandingan semua pendapatan dari kegiatan operasi maupun kegiatan non operasi perusahaan (Suprpto, 2013:4).

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah Koeswardhana (2020) Maharani (2020) dan Suprpto (2013) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa

laba bersih berpengaruh signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Penelitian lain dilakukan oleh Alamsyah dan Shodiq (2019) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa laba bersih berpengaruh positif dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.

Penelitian terdahulu yang berlawanan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2018) dengan hasil penelitian menyatakan laba bersih secara parsial tidak berpengaruh terhadap arus kas di masa mendatang pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

#### 4. **Lab Kotor, Lab Operasi Dan Lab Bersih Terhadap Arus Kas Di masa Mendatang**

Berdasarkan hasil uji simultan (F) laba kotor, laba operasi dan laba bersih mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2017-2019.

Lab sendiri mempunyai keterkaitan dalam memberikan keyakinan terkait lab adalah sumber untuk memprediksi arus kas bagi investor maupun kreditur serta pemakai laporan keuangan lainnya. Lab akuntansi mempunyai manfaat untuk penanganan manajemen dan juga memiliki informasi yang sangat berguna bagi para investor sehingga dapat mempengaruhi arus kas di masa mendatang. Peningkatan angka lab pada sebuah perusahaan sendiri mampu menarik minat para investor atau kreditur untuk menyimpan modalnya ke perusahaan tersebut.

Lab bukan saja menyajikan perbedaaan informasi terkait transaksi yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan arus kas, akan tetapi juga mampu memprediksi aktivitas investasi maupun operasi di masa depan. Karena informasi yang disajikan terutama terkait kondisi lab pada sebuah perusahaan dapat menjadi sinyal yang bagus bagi para pemakai laporan keuangan seperti investor dan kreditur untuk membuat atau mengambil keputusan ekonomi. Informasi ini dapat dijadikan

bakal pertimbangan untuk penentuan keputusan ekonomi (Prayoga, 2012 dalam Maharani, 2020:10). Hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini Koeswardhana (2020), Fadila (2018), Maharani (2020) dan Suprpto (2013) dengan hasil uji simultan menyatakan bahwa lab kotor, lab operasi dan lab bersih secara simultan berpengaruh signifikan terhadap arus kas di masa mendatang.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Laba kotor tidak mempunyai pengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Laba kotor tidak mempertimbangkan beban operasi yang mempunyai kaitan langsung terhadap kegiatan operasi dari sebuah perusahaan
2. Laba operasi mempunyai pengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Laba operasi mempunyai kaitan langsung dengan penciptaan lab melalui biaya-biaya operasi yang dikeluarkan perusahaan
3. Laba bersih mempunyai pengaruh dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Laba bersih yang bersifat akrual yang didapatkan dari lab sebelum pajak dan juga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 pendapatan lain seperti pendapatan bunga yang dilakukan secara kredit dapat menyebabkan arus kas masuk atau keluar di masa depan.
4. Laba kotor, laba operasi dan laba bersih mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi arus kas di masa mendatang pada perusahaan pertambangan



## **Saran**

### 1. Bagi perusahaan

Diharapkan mampu mengetahui prospek keuangan perusahaan melalui informasi yang disajikan laporan keuangan terutama laporan laba rugi yang memuat informasi terkait laba kotor, laba operasi dan laba bersih terutama

dalam memprediksi arus kas di masa mendatang

### 2. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan mampunya memberikan hasil yang lebih dengan menambahkan variabel-variabel lain seperti harga saham yang mempunyai indikasi dalam memprediksi arus kas di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alamsyah, A. A. dan, & N, A. A. (2019). Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi, Dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Di Masa Mendatang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 08(01), 119–131.
- Fadila, Z. (2018). Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Di masa Mendatang Pada Perusahaan Transportasi yang Terdaftar Di BEI Periode 2013 - 2017. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 2(4), 1–6.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*, (2012).
- Jusup, A. H. (2017). *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kasmir. (2017). *Pengantar Manajemen Keuangan* (2nd ed.). Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Kieso, E. D., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah Volume 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, E. D., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah Volume 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Koeswardhana, G. (2020). Analisis Kemampuan Laba Kotor , Laba Operasi Dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Di Masa Mendatang. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(1), 1–8.
- Maharani, Y. (2020). Model Prediksi Arus Kas di Masa Depan (Studi Empiris pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 1–13.  
<https://doi.org/10.47747/jismab.v1i1.2>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Suprpto. (2013). *Informasi Laba Dalam Memprediksi Arus Kas Di Masa Mendatang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia )*. 2, 163–176.
- Suwardjono. (2016). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Syakur. (2009). *Intermediate Accounting: Dalam Perspektif Lebih Luas*. Jakarta: AV Publisher.
- Warren, S. C., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Suhardianto, N., Kalanjati, D. S., Jusuf, A. A., & Djakman, C. D. (2014). *Pengantar Akuntansi* (25th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT  
DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI  
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**Ady Cusrell William Ly**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

e-mail: williamly0808@gmail.com

**Anthon Simon Y. Kerih**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

e-mail: kerihianthon@gmail.com

**Sarlin P. Nawa Pau**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana

e-mail: sarlin.pau@staf.undana.ac.id

**ABSTRAK**

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu instansi pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun permasalahan yang terjadi bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten Sabu Raijua khususnya tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai ketentuan namun masih terdapat beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan dengan alasan kurangnya beberapa sumber daya yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan khususnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2019 sampai 2021 yakni audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai serta alokasi waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang kurang memadai.

***Kata kunci :*** *Inspektorat Daerah, Audit, Revidu, Evaluasi, Pemantauan, Kendala*

## ABSTRACT

*The Office of the Regional Inspectorate of Sabu Raijua District is one of the government agencies that has a supervisory function on the implementation of regional government. Where one of the missions to be achieved is to improve the quality of supervision of the implementation of regional government. However, the problem that occurs is that the implementation of the supervisory function on the implementation of regional government in Sabu Raijua district, especially in 2019 to 2021, has been carried out according to the provisions, but there are still several sub-activities that have not been implemented. implemented due to the lack of available resources. Data collection techniques used in this research are questionnaires, interviews, and documentation. In this study, the analysis used was descriptive qualitative data analysis. The results of the study concluded that the implementation of the supervisory function, especially at the Regional Inspectorate of Sabu Raijua Regency in 2019 to 2021, namely audit, review, evaluation, and monitoring had been carried out according to the provisions, but there were several sub-activities that had not been carried out due to lack of adequate human resources and time allocation. implementation of inadequate supervision activities.*

**Keywords :** *Regional Inspectorate, Audit, Review, Evaluation, Monitoring, Detention*

## PENDAHULUAN

Berbagai masalah penyimpangan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang, serta permasalahan umum sebagai akibat dari adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sering terjadi di Indonesia saat ini. Untuk itu berbagai upaya dilakukan Pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dengan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good government*) yang mengarah pada Pemerintahan yang bersih (*clean government*). Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan peningkatan peran fungsi pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun eksternal yang memadai di lingkup pemerintahan. Sasaran atau target pengawasan pada organisasi Pemerintahan adalah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk mencapai target fungsi pengawasan yang telah ditetapkan secara maksimal, maka fungsi pengawasan tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Maka dari itu Pemerintah

juga melaksanakan peningkatan keefektifan dan keefisienan pekerjaan terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sangat dibutuhkan khususnya aparat yang akan melaksanakan fungsi pemerintahan yang ada. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan terlebih di masa revolusi industry 4.0 sekarang ini. Pendekatannya yaitu difokuskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna untuk penyampaian kebijakan pemerintah daerah baik ditingkat pusat sampai desa-desa sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus Rumah Tangga Negara mereka sendiri secara Otonom. Otonom atau otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada

daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan tanggung jawab kepada perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang luas itulah maka dibutuhkan fungsi/tugas pengawasan yang optimal yang dalam hal ini salah satu instansi yang melaksanakannya adalah Inspektorat Daerah, karena tanpa pengawasan maka peluang terjadinya penyimpangan seperti pernyataan diatas bisa terjadi.

Fungsi pengawasan pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan/audit, sedangkan sasarannya ditemukan adanya penyimpangan yang terjadi. Pengawasan itu sendiri menurut Handoko dalam Kusumawardani (2021) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, selain memastikan pelaksanaan program/kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis (3E) juga menilai kinerja Perangkat Daerah sehingga jika ditemukan adanya penyimpangan maka tindakan yang dilakukan antara lain memberikan rekomendasi perbaikan kepada *Top Management* atau pimpinan organisasi / Perangkat Daerah yang diperiksa. Bentuk pengawasan intern berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP), adalah seluruh proses kegiatan pemeriksaan/audit, reuiu, pengevaluasian, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang

memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan yang telah ditetapkan untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D Kabupaten Sabu Raijua yang menyatakan bahwa salah satu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Salah satu Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua, menghasilkan Opini BPK terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan LKPD yang ada yakni pada Tahun Anggaran 2020 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam hal ini Kabupaten Sabu Raijua mendapat Opini BPK yaitu WTP pada tahun anggaran 2020 dengan beberapa catatan yang dikutip dari [www.ntt.bpk.go.id](http://www.ntt.bpk.go.id) yang menyatakan masih ada penatausahaan aset daerah yang belum sepenuhnya diperiksa

secara tertib, sedangkan tahun-tahun sebelumnya (2018 dan 2019) mendapat opini BPK yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Hal itulah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagai instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan di lingkup intern pemerintahan untuk melakukan pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua merupakan salah satu organisasi Pemerintahan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 17 Tahun 2011 yang melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sabu Raijua. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua harus mengacu atau berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 yang memiliki Fungsi Pengawasan antara lain seperti, Perencanaan Program Pengawasan, Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan, serta kegiatan Pemeriksaan (Audit), Reviu, Pemantauan dan Pengevaluasian tugas Pengawasan pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sabu Raijua.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua tersebut, dilaksanakan pada 100 Perangkat Daerah dan 102 Unit Sekolah (TK-SMP). Namun dalam pelaksanaannya, terdapat contoh kasus menurut *www.korantimor.com* yang dapat dikatakan bahwa Fungsi Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua belum maksimal yaitu, terdapat Dana Desa dengan nilai sekitar 11 Miliar Rupiah pada sebelas desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai 5 Miliar Rupiah pada sembilan desa di Kabupaten Sabu Raijua dengan Tahun Anggaran 2019 diduga bermasalah dan belum pernah diperiksa

oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, serta atas perintah Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur ditugaskan melakukan audit pada lima Perangkat Daerah setiap tahunnya. Hal itu dikarenakan karena ruang lingkup pengawasan yang harus di *cover* oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua begitu luas, dengan rincian 100 Perangkat Daerah dan 102 Unit Sekolah (TK-SMP), yang dilaksanakan oleh 5 orang auditor serta dibantu oleh 5 orang pejabat fungsional lainnya (Irbn dan Kasubag).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi ialah bahwa pelaksanaan pengawasan dari tahun 2019 sejauh ini belum terlaksana dengan maksimal, diduga karena masih ada kasus yang belum diperiksa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang dan dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua, diduga masih harus dibantu oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini diduga adanya kendala yang menghambat seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (Auditor) yang memadai, kekurangan Sarana Prasarana, dan faktor lain seperti ketersediaan Anggaran dalam pelaksanaan pengawasan dan alokasi waktu.

Maka dari fenomena serta dugaan yang ada, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sabu Raijua* “ .

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara

Timur. Sumber Data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian yang ini yaitu kepala Inspektorat dan pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait mengenai pengawasan inspektorat seperti undang-undang dan peraturan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Kuesioner
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Terdapat tahapan-tahapan analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Pengumpulan Data.
- b. Penyajian Data.
- c. Reduksi Data.
- d. Penarikan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua**

#### **A. Audit**

Pemeriksaan atau biasa disebut audit menurut Arens,dkk(2011) merupakan pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah

ditetapkan serta Audit dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Audit tidak hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan besar atau instansi swasta, dilingkup Pemerintahan baik ditingkat pusat sampai pada daerah-daerah yakni Provinsi dan Kabupaten/Kota juga wajib dilaksanakan proses pemeriksaan atau audit.

Audit dilingkungan instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan juga pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang mengatakan bahwa Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) baik BPK, Inspektorat Jenderal serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melaksanakan pengawasan yakin kegiatan audit di lingkup Pemerintahan, antara lain yakni :

- a. Audit Laporan Keuangan
- b. Audit Kinerja
- c. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Selain tiga jenis audit tersebut, ada satu jenis audit yang disebut *Probity* Audit yang diatur dalam pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas berdasarkan jawaban yang diberikan responden melalui angket/kuesioner juga dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua hanya melaksanakan dua jenis pemeriksaan/audit yakni audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, sedangkan *probity* audit dan Audit Laporan Keuangan tidak dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua karena

keterbatasan kewenangan dan Sumber Daya Manusia (tenaga auditor).

Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi Pengawasan (Audit) di Inspektorat Sabu Raijua:

*“Pada tahun 2019 s.d 2021 kami hanya melaksanakan Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu atau yang biasa kami sebut Pemeriksaan Khusus (Pemsus). Sedangkan Audit Laporan Keuangan tidak dilaksanakan karena diperiksa BPK RI dan Probitas Audit tidak kami laksanakan dikarenakan untuk pengadaan barang jasa kami hanya melakukan reviu saja tidak melakukan pemeriksaan, dan juga keterbatasan auditor yang ada.” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022, pukul 13.41 siang).*

## B. Reviu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), Reviu adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan, dan pedoman pemeriksaan lain yang ditetapkan BPK untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Dalam pemerintahan, ada beberapa laporan yang harus dilakukan reviu oleh Aparat Intern Pemerintah (APIP), baik BPKP hingga sampai Inspektorat Daerah, baik ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain:

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- c. Dokumen Perencanaan
- d. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)
- e. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Berdasarkan Hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui jawaban yang diberikan responden melalui angket/kuesioner juga dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diketahui Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan seluruh bentuk kegiatan reviu sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi Pengawasan (Reviu) di Inspektorat Sabu Raijua:

*“Kalau untuk pelaksanaan kegiatan reviu seluruhnya sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022)*

## C. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012:6). Menurut Indiahono dalam Damanik & Marom (2016), Evaluasi dalam kebijakan publik/pemerintahan adalah kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil.

Di dalam pemerintahan, ada beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi oleh Aparat Intern Pemerintah (APIP), baik BPKP hingga sampai Inspektorat Daerah, baik ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain:

- a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- c. Dana Desa
- d. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- e. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- f. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, diketahui bahwa kegiatan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan kegiatan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tidak dicantumkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut belum dilaksanakan.

Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi Pengawasan (Evaluasi) di Inspektorat Sabu Raijua:

*“Semua kegiatan evaluasi tersebut Inspektorat Sabu Raijua belum melaksanakannya. Jadi kegiatan tersebut sudah ada pada target awal di PKPT, tapi saat perubahan Anggaran, disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, contohnya auditornya yang terbatas. “(Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).*

#### **D. Pemantauan**

Pemantauan atau *Monitoring* adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu (Rohayati, 2014). Sedangkan menurut Mudjahidin (2012), *Monitoring* adalah penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan

proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan.

Di dalam pemerintahan, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemantauan/monitoring oleh Aparat Intern Pemerintah (APIP), baik BPK hingga sampai Inspektorat Daerah, baik ditingkat pusat sampai kabupaten/kota, antara lain:

- a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)
- b. Dana Desa
- c. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- d. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Berdasarkan data pada hasil penelitian diatas, diketahui bahwa kegiatan pemantauan telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019 sampai 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan didukung hasil penelitian melalui angket/kuesioner diketahui kegiatan-kegiatan pemantauan yakni kegiatan TLHP dan pemantauan LHKPN/LHKASN telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Sedangkan untuk pemantauan Dana Desa dan Dana BOS untuk tahun 2019 sampai 2021, belum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua karena tidak diprogramkan didalam PKPT 2019-2021, dengan alasan menyesuaikan dengan kondisi Sumber Daya yang ada pada saat perubahan anggaran.

Berikut hasil wawancara mengenai Fungsi Pengawasan (Pemantauan) di Inspektorat Sabu Raijua:

*“Pelaksanaan kegiatan pemantauan beberapa sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua sesuai dengan PKPT yang ada.*



*Tapi ada juga yang belum dilaksanakan, karena adanya perubahan anggaran, bahwa setelah perubahan anggaran, disesuaikan lagi pengawasan yang ada dengan kemampuan yang dimiliki.” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).*

## **Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Sabu Raijua**

### **A. Sumber Daya Manusia**

Nawawi, (2011:42) menjelaskan pengertian SDM menjadi dua bagian yaitu makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain.

SDM dalam pelaksanaan tugas pengawasan dibutuhkan tenaga Auditor yang kompeten dan profesional. Yang dimaksud dengan tenaga auditor yang berkompeten adalah SDM yang telah memiliki sertifikasi keahlian di bidang audit yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten pula.

Sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan hasil penelitian, berjumlah tujuh belas orang pegawai negeri sipil (PNS), yang terdiri dari satu orang Inspektur, tiga orang Inspektur Pembantu (Irbn), lima orang Auditor, dua orang Kepala Sub.Bagian (Kasubag), dan enam orang fungsional umum. Namun di dalam penelitian ini yang terfokus kepada pelaksanaan fungsi pengawasan, maka dari itu Sumber Daya Manusia yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah Auditor, yang mana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua berjumlah lima orang, Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua hanya memiliki 5 orang pejabat fungsional auditor untuk melaksanakan pengawasan pada 202 obyek pengawasan (perangkat daerah, desa dan sekolah). Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM (tenaga auditor) tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua. Dampak dari kurangnya tenaga auditor adalah adanya obyek pengawasan yang tidak dapat dijangkau dalam kegiatan pengawasan setiap tahun disamping adanya kebijakan pelibatan PNS fungsional umum dalam kegiatan-kegiatan pengawasan. Hal ini dapat berdampak terhadap hasil-hasil pengawasan.

Berikut hasil wawancara mengenai Kendala (Sumber Daya Manusia) Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Sabu Raijua:

*“Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki memang terbatas dalam hal Auditor di Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua. Auditor yang ada hanya berjumlah lima orang, satu orang auditor senior nanti di bulan september akan memasukim Batas Usian Pensiun (BUP). Karena kendala Sumber Daya tersebut, maka dalam pelaksanaan pengawasan juga melibatkan beberapa orang pejabat struktural yang berjumlah lima orang yaitu Inspektur Pembantu I, Inpektur Pembantu II, Inspektur Peembantu III, Ahli Muda Perencana dan Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022)*

### **B. Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa : Komputer, Laptop, Printer, Kamera, Alat Tulis Kantor (ATK), Meja, Kursi, Gedung kantor, dan lain sebagainya. Khusus sarana untuk mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas auditor di Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua terdapat 12 unit laptop selain printer dan sarana lainnya. Jika dilihat dari jumlah laptop yang ada, dapat dikatakan bahwa keberadaan Sarana dan Prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua telah memadai.

Berikut hasil wawancara mengenai Kendala (Sarana Prasarana) Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Sabu Raijua:

*“Kalau untuk sarana seperti Laptop, Komputer, ATK, dan lainnya kami menggunakan fasilitas milik kantor kendati ada juga yang menggunakan fasilitas milik pribadi” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022)*

### **C. Anggaran**

Dalam lingkup pemerintahan, anggaran atau yang disebut APBD, sangat diperlukan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah. Menurut Badrudin (2012) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan

perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Ketersediaan Anggaran yang memadai sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan. Anggaran merupakan salah satu sumber daya (input) yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan termasuk kegiatan pengawasan. Tanpa anggaran yang memadai, kegiatan tidak akan terlaksana secara baik bahkan jika anggaran tidak memadai akan berdampak pada output atau hasil yang diperoleh baik dari aspek mutu atau kualitas maupun kepuasan penerima manfaat. Anggaran yang ada pada Pemerintah terkhususnya Pemerintah Daerah, dialokasikan sesuai aturan yang ada.

Berikut hasil wawancara mengenai Kendala (Anggaran) Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Sabu Raijua:

*“Anggaran yang ada sudah memadai untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang ada kendati belum sepenuhnya sesuai ketentuan” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).*

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ketersediaan anggaran yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, sudah memadai.

### **D. Waktu**

Berdasarkan hasil penelitian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, yang diperoleh dari wawancara serta angket yang disebar, diperoleh hasil bahwa waktu yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, dinilai belum cukup atau memadai, sehingga bisa berdampak terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Berikut hasil wawancara mengenai Kendala (Waktu) Dalam Melaksanakan

Fungsi Pengawasan di Inspektorat Sabu Raijua:

*“Untuk waktu sendiri belum maksimal dan memadai dalam pelaksanaan pengawasan untuk mengerjakan langkah kerja yang seharusnya dilaksanakan.” (Hasil wawancara dengan seorang Auditor, bpk J.S, tanggal 14 Maret 2022).*

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Hasil penelitian mengatakan bahwa kegiatan audit yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dinilai belum maksimal dikarenakan masih ada satu kegiatan audit yaitu probity audit yang belum dilaksanakan dengan alasan kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada. Hasil penelitian juga mengatakan bahwa kegiatan reviu yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dinilai sudah maksimal, karena keseluruhan laporan yang harus direviu telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil penelitian yang berikut juga mengatakan bahwa kegiatan evaluasi yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dinilai belum maksimal dikarenakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang disebarkan, seluruh evaluasi yang dimaksudkan pada tabel 4.2.1.3, seluruhnya belum dilakukan kegiatan evaluasi, dikarenakan Inspektorat Daerah

Kabupaten Sabu Raijua saat menyusun PKPT, menyesuaikan dengan kekuatan Sumber Daya yang dimiliki, dalam hal ini ketersediaan SDM. Serta berdasarkan hasil penelitian, kegiatan pemantauan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dinilai belum maksimal dikarenakan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner yang disebarkan, dari kegiatan pemantauan yang dimaksud dalam tabel, belum terlaksana seluruhnya, dikarenakan terbatasnya SDM yang dimiliki dan alokasi waktu yang dinilai kurang dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan.

2. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, angket yang ada, serta data auditor yang didapat, kendala pertama yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2019 sampai 2021 yaitu kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam hal ini Auditor. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh kesimpulan yakni kendala kedua yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tahun 2019 sampai 2021 yaitu kurangnya waktu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang ada.

### Saran

Adapun berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Objek Penelitian  
Meningkatkan banyaknya obyek pengawasan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua diharapkan segera melakukan komunikasi dengan pejabat berwenang dalam upaya

menambah jumlah SDM dalam hal ini jumlah auditor dengan keahlian / kapabilitas sesuai kebutuhan, sehingga dengan tersedianya auditor yang berkualitas sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan akan lebih maksimal. Selain itu disarankan agar memperhatikan alokasi waktu yang diberikan terhadap masing-masing kegiatan pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan) secara memadai sesuai karakteristik kegiatan pengawasan, agar pengawasan bisa berjalan dengan

efektif, efisien dan mendapat hasil yang maksimal.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih banyak sumber atau data mengenai fungsi pengawasan yang ada pada Inspektorat Daerah karena pada penelitian ini terkendala adanya bencana non alam *pandemic covid-19* sehingga penelitian ini hanya fokus pada empat unsur pengawasan sedangkan terkait dengan unsur pengawasan lainnya tidak diteliti dengan asumsi telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A. (2011). *Auditing Dan Jasa Assurance*. Edited by H. Wibi and S. Suryadi. Jakarta: Erlangga.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang." *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11.  
[https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp\\_pmr/article/view/12486](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jp_pmr/article/view/12486)
- KBBI. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.  
<https://www.kamusbesar.com/reviu>
- Mudjahidin, M., & Dita Pahang Putra, N. (2012). "Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Perkembangan Proyek Berbasis Web." *Jurnal Teknik Industri*, 11(1), 75.  
<https://doi.org/10.22219/jtiumm.vol11.no1.75-83>
- Nawawi. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pancasari Kusumawardani, V. (2021). "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Katingan." *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 16(1), 69–82.  
<https://doi.org/10.33084/pedagogik.v16i1.2333>
- Rohayati, M. (2014). "Membangun Sistem Informasi Monitoring Data Inventory Di Vio Hotel Indonesia." *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA)*, 1(1), 1–8.
- Widoyoko, E. P. (2012). *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

**PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, PERILAKU BELAJAR DAN MINAT BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI (STUDI PADA MAHASISWA AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NUSA CENDANA)**

**Theodora Vivinia Ndait**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
vivinndait1999@gmail.com

**Minarni Anaci Dethan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
minarni.dethan@staf.undana.ac.id

**Sarlin Paleina Nawa Pau**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
sarlin.pau@staf.undana.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar dan minat belajar terhadap pemahaman akuntansi secara parsial dan silmultan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis regresi linear berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 135. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi, sedangkan perilaku belajar dan minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, perilaku belajar dan minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi

**Kata kunci:** Kecerdasan emosional, perilaku belajar, minat belajar, pemahaman akuntansi.

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to know the effect of emotional intelligence, learning behavior and learning interest towards the understanding of accounting partially and simultaneously. The technique of analysis used in this research is multiple linear regression. The data was collected by questionnaire. Sample used in this research is 135. The results of this research showed that partially emotional intelligence has no effect towards the understanding of accounting, whereas learning behavior and learning interest affect the understanding of accounting. The result of this research simultaneously showed that emotional intelligence, learning behavior and learning interest affect the understanding of accounting*

**Keywords:** *Emotional intelligence, learning behavior, learning interest, understanding of accounting.*

**PENDAHULUAN**

Pada era sekarang, pendidikan yang tinggi sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Mahasiswa diharapkan mempersiapkan diri mereka

dengan baik selama mereka berada di bangku perkuliahan. Pendidikan merupakan hal prioritas utama karena melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia setiap individu dapat dikembangkan dan diperbaiki.

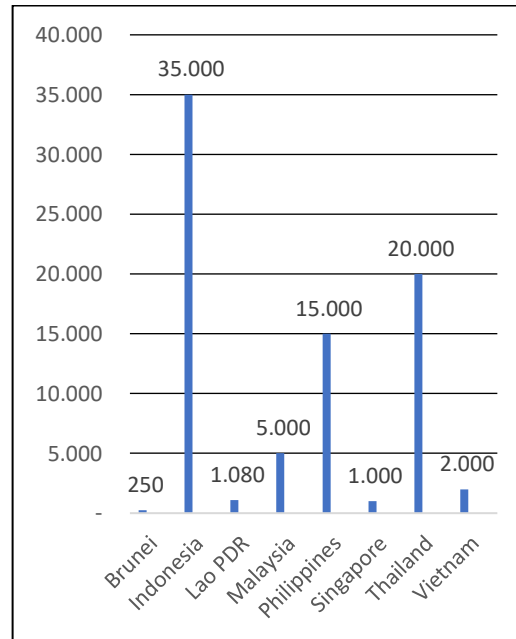
Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menambah pengetahuan dan pengembangan kemampuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik. Dunia Pendidikan, terutama dunia pendidikan akuntansi, banyak hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas. Hal ini dilakukan agar proses belajar berjalan dengan efektif dan dapat memberikan manfaat yang diharapkan (Sari dkk, 2017).

Pada jenjang pendidikan tinggi jurusan akuntansi mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pemahaman ilmu akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikthisarian dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi sisi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Pada pembelajaran mata kuliah ini mahasiswa tidak lepas dari tuntutan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran. Kompetensi tersebut diwujudkan dalam hasil belajar. Salah satu cara untuk memahami konsep tersebut adalah dengan memahami konsep yang ada didalamnya (Mutia, 2015).

Menurut Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, Prof. Mardiasmo, CA mengatakan bahwa Indonesia pada saat ini memiliki lebih dari 266 ribu mahasiswa akuntansi aktif yang berasal dari 589 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Data dari *World Bank* menyatakan lulusan mahasiswa Akuntansi dari seluruh ASEAN rata-rata tiap tahun berjumlah 77.330 orang. Indonesia merupakan peringkat pertama terbanyak penghasil lulusan Akuntansi ASEAN, karena setiap tahun, Indonesia meluluskan lebih dari 35 ribu mahasiswa akuntansi (IAI, 2016). Fakultas ekonomi program studi akuntansi untuk lulusan program tersebut dari berbagai perguruan tinggi saat ini dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pemahaman ilmu akuntansi. berkembangnya teknologi sekarang ini seperti internet, komputerisasi dan sebagainya memudahkan seseorang mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuannya. Namun, teknologi semakin

berkembang pesat tersebut bukan jaminan bagi dunia pendidikan untuk berhasil dan mencapai hasil yang maksimal (Mutia, 2015).

**Gambar 1** Grafik Perbandingan Jumlah Lulusan Akuntansi Tiap Tahun di Negara ASEAN



Sumber: *World Bank dalam (IAI, 2017).*

Tanda seorang mahasiswa memahami akuntansi tidak hanya ditunjukkan dari nilai-nilai yang didapatkannya dalam mata kuliah saja, tetapi juga apabila mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep yang terkait. Namun kenyataannya, masih banyak yang kurang pemahaman terhadap mata kuliah yang khususnya akuntansi, tidak memperhatikan pemaparan materi di kelas, sikap cuek dengan situasi kelas, tidak memperhatikan tugas yang diberikan serta kurangnya minat terhadap mata kuliah (Sari dkk, 2017). Ada beberapa faktor di dalam dunia pendidikan yang menentukan seberapa paham mahasiswa akan materi yang telah disampaikan oleh dosen, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan seorang mahasiswa adalah mampu mengenali diri sendiri dalam kaitannya tentang kecerdasan emosional (Sari dkk, 2017).

Kecerdasan emosional menurut (Goleman, 2016) adalah kemampuan

emosional yang meliputi kemampuan mengendalikan diri, mampu bertahan menghadapi frustrasi, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, berempati dan membina hubungan yang baik dengan individu lain. Banyak contoh disekitar kita membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan otak saja, atau banyak memiliki gelar yang tinggi belum tentu sukses berkiprah di dunia pekerjaan. Kebanyakan program Pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal (IQ) saja, padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat ini begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun karirnya terhambat atau lebih buruk lagi, tersingkir, akibat rendahnya kecerdasan emosional mereka (Rokhana dkk, 2016).

Faktor lain yang mendukung pemahaman mahasiswa akan mata kuliah akuntansi adalah Perilaku belajar. Perilaku belajar yang terjadi pada para peserta didik yang dikenal baik dalam proses maupun hasilnya. Proses belajar dapat terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan dalam dirinya yang tidak dapat dipenuhi dengan cara-cara refleks atau kebiasaan. Ia ditantang untuk mengubah perilaku yang ada agar dapat mencapai tujuan (Nurjan, 2015).

Fenomena yang terjadi, mengenai salah satu komponen perilaku belajar, yaitu kebiasaan membaca buku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Central Connecticut State University* yang bertajuk *World's Most Literate Nations Ranked* menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Sedangkan Finlandia menduduki peringkat pertama dengan tingkat literasi yang tinggi (hampir 100%). Sedangkan data statistik dari UNESCO menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia yang sangatlah memprihatinkan yaitu hanya 0,001% saja. Itu berarti dari 1.000 orang Indonesia hanya ada 1 orang yang rajin membaca (Anisa dkk, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan

membaca buku mahasiswa Indonesia masih tertinggal.

Selain perilaku belajar, faktor lain yang berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa akan mata kuliah akuntansi adalah Minat belajar. Minat belajar selama di perguruan tinggi juga mempengaruhi prestasi akademik seorang mahasiswa. Minat belajar mahasiswa erat kaitannya dengan penggunaan waktu yang baik untuk belajar maupun kegiatan lainnya (Rokhana dkk, 2016). Seseorang yang dapat belajar dengan baik, dengan kata lain ia harus memiliki kebiasaan untuk memusatkan pikiran. Jadi kebiasaan untuk memusatkan pikiran ini mutlak perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa yang belajar. Namun, Kenyataannya seseorang sering mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, hal ini disebabkan karena kurang berminat terhadap mata kuliah yang dipelajari, terganggu oleh keadaan lingkungan, pikiran kacau dengan banyak urusan/ masalah, bosan terhadap mata kuliah dan lain-lain (Slameto, 2015). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul "Pengaruh kecerdasan emosional, perilaku belajar dan minat belajar terhadap pemahaman akuntansi".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kecerdasan emosional**

Kecerdasan emosional (KE) terdiri dari dua kata dasar yaitu, cerdas dan emosi, karenanya kecerdasan emosional merujuk pada proses atau perjalanan menempuh wawasan ilmiah menuju wilayah emosi yang tujuannya adalah memahami arti dan cara untuk memahami kecerdasan ke dalam emosi (Thahir, 2014). Kecerdasan emosional adalah kemampuan mengelola dan mengendalikan emosi seperti kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, dan bertahan menghadapi frustrasi, menghadapi dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa.

Menurut Goleman dalam (Mutia, 2015) terdapat lima dimensi atau komponen kecerdasan emosional yaitu:

### 1. Pengenalan diri

Menurut Gea & dkk dalam (Mutia, 2015) mengenal diri berarti memahami kekhasan fisiknya, keperibadian, watak dan tempramennya, mengenal bakat-bakat alamia yang dimilikinya serta mempunyai gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kesulitan dan kelemahannya.

### 2. Pengendalian diri

Menurut Goleman dalam (Mutia, 2015) pengendalian diri merupakan sikap hati-hati dan cerdas dalam mengatur kehidupan, keseimbangan emosi, bukan menekan emosi, karena setiap perasaan mempunyai nilai dan makna.

### 3. Motivasi

Menurut Melandy & dkk dalam (Mutia, 2015) motivasi didefinisikan sebagai keinginan dari dalam yang kemudian mendorong seseorang untuk bertindak. Motivator yang paling berdaya guna adalah motivator dari dalam, bukan dari luar. Keinginan untuk maju dari dalam diri mahasiswa akan menimbulkan semangat dalam meningkatkan kualitas mereka.

### 4. Empati

Goleman dalam (Mutia, 2015) berpendapat bahwa empati atau mengenal emosi orang lain dibangun berdasarkan kesadaran diri. Jika seseorang terbuka pada emosi diri sendiri, maka dipastikan bahwa ia akan terampil membaca perasaan orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan emosinya sendiri dapat dipastikan tidak akan mampu menghormati perasaan orang lain.

### 5. Keterampilan sosial

Menurut Jones dalam (Mutia, 2015) Kemampuan membina hubungan dengan orang lain adalah serangkaian pilihan yang dapat membuat anda mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang yang berhubungan dengan anda atau orang lain yang anda hubungi.

## **Perilaku belajar**

Menurut Slameto dalam (Nurjan, 2015) Menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Menurut Suwardjono dalam (Mutia, 2015:5) Perilaku belajar yang baik terdiri dari:

1. Kebiasaan mengikuti pelajaran, adalah kebiasaan yang dilakukan mahasiswa pada saat pelajaran sedang berlangsung. Mahasiswa yang mengikuti pelajaran dengan tertib dan penuh perhatian serta dicatat dengan baik akan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Kebiasaan mengikuti pelajaran ini ditekankan pada kebiasaan memperhatikan penjelasan dosen, membuat catatan dan keaktifan di kelas.

2. Kebiasaan membaca buku, merupakan keterampilan membaca yang paling penting untuk dikuasai mahasiswa. Kebiasaan membaca harus dibudidayakan agar pengetahuan mahasiswa bertambah dan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mempelajari suatu pelajaran.

3. Kunjungan ke perpustakaan, merupakan kebiasaan mahasiswa untuk mencari referensi yang dibutuhkan agar dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap pelajaran. Walaupun pada dasarnya sumber bacaan bisa ditemukan dimanamana, namun tempat yang paling umum dan memiliki sumber yang lengkap adalah perpustakaan.

4. Kebiasaan menghadapi ujian, adalah kebiasaan yang dilakukan mahasiswa Ketika akan menghadapi ujian. Setiap ujian tertentu dapat dilewati oleh seorang siswa dengan berhasil jika sejak awal mengikuti pelajaran tersebut siswa tersebut belajar dengan sungguh-sungguh.

## **Minat belajar**

Minat belajar adalah seseorang yang menampakan diri dalam beberapa gejala, seperti: gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman



dengan kata lain minat belajar itu adalah perhatian, rasa suka, ketertarikan seseorang terhadap belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam belajar (Fahturrohman dkk, 2012).

Menurut (Slameto, 2015) komponen minat belajar terdiri dari:

1. Perasaan senang, Jika seorang siswa memiliki perasaan senang terhadap pelajaran tertentu maka tidak akan ada paksaan untuk belajar. Misalnya senang mengikuti pelajaran, tidak merasa bosan, hadir dalam pelajaran.
2. Keterlibatan. Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang menyebabkan orang tersebut senang dan tertarik melakukan aktivitas dari objek tersebut. Misalnya aktif berdiskusi, aktif bertanya, dan aktif menjawab pertanyaan dosen.
3. Ketertarikan, Hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang terhadap minat pada objek, orang, aktivitas atau dapat berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh aktivitas itu sendiri. Contohnya adalah antusias mengikuti pelajaran, tidak menunda-nunda tugas yang diberikan.
4. Perhatian, Minat dan perhatian adalah dua hal yang dianggap sama dalam penggunaan sehari-hari, perhatian adalah konsentrasi seseorang pada pengamatan dan pemahaman dengan mengesampingkan yang lain. Seseorang memiliki ketertarikan pada suatu objek, maka secara otomatis mereka akan memperhatikan objek tersebut. Contoh: Mendengarkan dan mencatat penjelasan dari dosen.

### **Pemahaman Akuntansi**

Menurut (Mahmudi, 2010) Pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan untuk memahami atau mengerti benar akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan.

### **HIPOTESIS**

1. H<sub>1</sub> : Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi
2. H<sub>2</sub> : Perilaku belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.

3. H<sub>3</sub> : Minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi
4. H<sub>4</sub> : Kecerdasan emosional, perilaku belajar dan minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang digunakan berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Nusa Cendana.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Angkatan 2018 yang berjumlah 203 orang. Sampel diperoleh melalui rumus:

$$n = \frac{N}{1 + n(e)^2}$$
$$n = \frac{203}{1 + 203(0,05)^2}$$
$$n = 134.66$$

Penelitian ini menggunakan 135 (dibulatkan) mahasiswa sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner.

### **Teknik analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika deskriptif, Uji kualitas data (uji validitas & uji reabilitas), analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis (uji t, uji f, koefisien determinasi).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Statistika deskriptif**

Variabel kecerdasan emosional yang terdiri atas 10 pertanyaan memiliki nilai minimum sebesar 27.00 dan nilai maksimum sebesar 50.00 yang diperoleh dari 135

responden, dengan nilai *mean* sebesar 39.4667 pada standar deviasi 5.55945.

Variabel perilaku belajar yang terdiri atas 8 pertanyaan memiliki nilai minimum sebesar 17.00 dan nilai maksimum sebesar 40.00 yang diperoleh dari 135 responden, dengan nilai *mean* sebesar 29.0370 pada standar deviasi 5.53201

Variabel minat belajar yang terdiri atas 8 pertanyaan memiliki nilai minimum 20.00 dan nilai maksimum sebesar 40.00 yang diperoleh dari 135 responden dengan nilai *mean* sebesar 32.5852 pada standar deviasi 4.63662.

Variabel pemahaman akuntansi yang terdiri atas 4 pertanyaan memiliki nilai minimum 8.00 dan nilai maksimum sebesar 20.00 yang diperoleh dari 135 responden dengan nilai *mean* sebesar 14.9481 pada standar deviasi 2.46261.

#### Uji validitas

Berdasarkan uji validitas diperoleh nilai  $r_{tabel}$  dari sampel (N)= 135 sebesar 0.1690 dan menunjukkan bahwa pertanyaan variabel independent dan variabel dependen adalah valid.

#### Uji reabilitas

Berdasarkan penelitian, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* dari empat variabel adalah >0.60 sehingga dapat disimpulkan instrumen semua variabel adalah *reliable*.

#### Uji analisis regresi linear berganda

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda, diperoleh persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 4.313 + 0.045 (X_1) + 0.175 (X_2) + 0.116 (X_3) + e$$

Model persamaan analisis regresi linear berganda dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstansta sebesar 4.313, artinya jika kecerdasan emosional ( $X_1$ ), perilaku belajar ( $X_2$ ), minat Belajar ( $X_3$ ) nilainya adalah 0 atau tidak terjadi perubahan independen, maka pemahaman akuntansi (Y) nilainya sebesar 4.313.

2. Koefisien regresi variabel kecerdasan emosional ( $X_1$ ) sebesar 0.045, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap atau konstan dan variabel kecerdasan emosional

mengalami kenaikan 1% maka pemahaman akuntansi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.045. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kecerdasan emosional berkontribusi positif terhadap pemahaman akuntansi.

3. Koefisien regresi variabel perilaku belajar ( $X_2$ ) sebesar 0.175, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap atau konstan dan variabel perilaku belajar mengalami kenaikan 1% maka pemahaman akuntansi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.175. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perilaku belajar berkontribusi positif terhadap pemahaman akuntansi.

4. Koefisien regresi variabel minat belajar ( $X_3$ ) sebesar 0.116, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap atau konstan dan variabel minat belajar mengalami kenaikan 1% maka pemahaman akuntansi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.116. Hal ini menunjukkan bahwa variabel minat belajar berkontribusi positif terhadap pemahaman akuntansi.

#### Hasil uji T

1. Dapat dilihat nilai signifikan kecerdasan emosional ( $X_1$ ) adalah  $0.336 > 0.05$ . Dengan nilai  $t_{tabel} = t((a/2: n-k-1) = t(0.05/2 ; 135-3-1) = (0.025 ; 131) = 1.97824$ . Berarti nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0.965 < 1.97824$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.

2. Dapat dilihat nilai signifikan perilaku belajar ( $X_2$ ) adalah  $0.000 < 0.05$ . Dengan nilai  $t_{tabel} = t((a/2: n-k-1) = t(0.05/2 ; 135-3-1) = (0.025 ; 131) = 1.97824$ . Berarti nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.772 > 1.97824$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.

3. Dapat dilihat nilai signifikan minat belajar ( $X_3$ ) adalah  $0.030 < 0.05$ . Dengan nilai  $t_{tabel} = t((a/2: n-k-1) = t(0.05/2 ; 135-3-1) = (0.025 ; 131) = 1.97824$ . Berarti nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.199 > 1.97824$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat belajar

berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi.

#### **Hasil uji f**

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $31.523 > 2.67$ ) dengan nilai signifikannya sebesar ( $0.000 < 0.05$ ). Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosional ( $X_1$ ), perilaku belajar ( $X_2$ ) dan minat belajar ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi ( $Y$ ).

#### **Hasil uji koefisien determinasi**

Diketahui nilai koefisien determinan yang terdapat pada *Adjusted R Square* sebesar 0.406. Maka dapat diartikan bahwa variabel independen kecerdasan emosional ( $X_1$ ), perilaku belajar ( $X_2$ ), minat belajar ( $X_3$ ) memiliki pengaruh sebesar 40.6% terhadap variabel dependen pemahaman akuntansi ( $Y$ ). Sedangkan 59.4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Misalnya latar belakang pendidikan, cara mengajar dosen dan kecerdasan spiritual (Susanti dkk, 2017).

### **PEMBAHASAN**

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. Tidak berpengaruhnya kecerdasan emosional terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa akuntansi UNDANA dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan sosial yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi UNDANA. Berdasarkan indikator kuesioner yang dibagikan, sebagian besar mahasiswa akuntansi UNDANA sering merasa gugup dan sulit berkonsentrasi saat mempresentasikan materi kalau diperhatikan banyak orang.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi yakni sebesar  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.772 > 1.97824$ ) dengan signifikan  $0.000 < 0.05$ . Berdasarkan hasil penelitian pengaruh perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa akuntansi UNDANA menunjukkan adanya perilaku belajar yang baik. Hal ini dapat dilihat

melalui kebiasaan sebagian besar mahasiswa yang selalu memusatkan perhatian pada materi yang diajarkan di kelas dan berusaha untuk aktif dalam berdiskusi dan dapat juga dilihat dari kebiasaan membaca buku mahasiswa yang selalu berusaha untuk memahami apa yang dibacanya.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi yakni sebesar  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2.199 > 1.97824$ ) dengan nilai signifikan  $0.030 < 0.05$ . Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa akuntansi UNDANA memiliki minat belajar yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa akuntansi UNDANA memiliki minat dalam mempelajari akuntansi seperti tetap mempelajari akuntansi dan tidak bosan meskipun akuntansi membutuhkan ketelitian dan ketekunan dan juga membaca buku lain yang berkaitan dengan akuntansi untuk menambah pengetahuan.

4. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, perilaku belajar dan minat belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi. Yang berarti mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan mengenali dirinya, memotivasi dirinya untuk belajar lebih giat untuk meningkatkan pemahamannya terhadap mata kuliah akuntansi. Dan juga diimbangi dengan perilaku belajar yang tekun dan rajin serta memiliki minat yang besar terhadap mata kuliah akuntansi akan meningkatkan pemahaman akuntansi mahasiswa tersebut.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **KESIMPULAN**

1. Kecerdasan emosional tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya keterampilan sosial yang dimiliki oleh mahasiswa yang mana merupakan salah satu komponen dalam kecerdasan emosional.

2. Perilaku belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa akuntansi UNDANA. Mahasiswa yang memiliki

perilaku belajar yang baik akan semakin baik pemahamannya akan mata kuliah akuntansi.

3. Minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. Semakin baik minat belajar seorang mahasiswa maka akan semakin baik dalam pemahaman mata kuliah akuntansi

4. Kecerdasan emosional, perilaku belajar dan minat belajar berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa. Hal ini berarti kecerdasan emosional, perilaku belajar dan minat belajar akan meningkatkan pemahaman akuntansi yang baik

## SARAN

### 1. Objek penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar objek penelitian (mahasiswa akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis UNDANA) lebih banyak membaca buku yang berkaitan dengan mata kuliah akuntansi, memiliki minat yang tinggi untuk belajar, lebih mampu memotivasi diri untuk terus belajar, lebih berkonsentrasi dalam belajar dan membuat pola belajar yang tepat.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang dan objek yang sama disarankan untuk menambah variabel-variabel yang mempengaruhi pemahaman akuntansi yang belum diteliti di dalam penelitian ini, seperti latar belakang pendidikan, cara mengajar dosen dan kecerdasan spiritual dan diharapkan menggunakan objek penelitian yang lebih luas, misalnya dari mahasiswa akuntansi di beberapa universitas di Kota Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, A. R., A. A. Ipungkarti, D., & K. N. Saffanah. (2021). Pengaruh Kurangnya Literasi Serta Kemampuan Dalam Berpikir Kritis Yang Masih Rendah Dalam Pendidikan Di Indonesia. *1st National Conference On Education, System And Technology Information*, 01(01), 1–4.
- Fahurrohman, M., & Sulistyorini. (2012). *Belajar Dan Pembelajaran: Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Dengan Standar Nasional*. Penerbit Teras.
- Goleman, D. (2016). *Emotional Inteligence* (Cetakan 21). Gramedia Pustaka Utama.
- Iai. (2016). *Kejar Ketertinggalan Akuntan Di Asean*. [Www.Iaiglobal.Or.Id](http://www.Iaiglobal.Or.Id). [Http://Iaiglobal.Or.Id/Berita-Kegiatan/Detailberita-895-Siaran-Pers-Iai-Icaew-Seminar-](http://Iaiglobal.Or.Id/Berita-Kegiatan/Detailberita-895-Siaran-Pers-Iai-Icaew-Seminar-)
- Iai. (2017). *Peluang Dan Tantangan Akuntan Di Era Mea*. [Www.Iaiglobal.Or.Id](http://www.Iaiglobal.Or.Id). [Http://Www.Iaiglobal.Or.Id/V03/Files/File\\_Publikasi/6.17\\_Sept\\_Panel\\_Session\\_Prof.Ilya\\_Avianti.Pdf](http://Www.Iaiglobal.Or.Id/V03/Files/File_Publikasi/6.17_Sept_Panel_Session_Prof.Ilya_Avianti.Pdf)
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Stie Ykpn.
- Mutia, A. (2015). Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–18. [Http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Students/Index.Php/Akt/Article/View/1609](http://Ejournal.Unp.Ac.Id/Students/Index.Php/Akt/Article/View/1609)
- Nurjan, S. (2015). *Psikologi Belajar*. Wade Group.
- Rokhana, L. A., & Sutrisno, S. (2016). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar Dan Minat Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UNTAG Semarang). *MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 31, 26–38.
- Sari, L. dian nofita, Herawati, N. trisna, & Sulindawati, N. lu gede erni. (2017). *Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa Akuntansi Program SI Universitas Pendidikan Ganesha. 1.*

- Slameto. (2015). *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Susanti, S., Rispantyo, & Djoko, K. (2017). Pengaruh Minat Belajar, Perilaku Belajar, Kecerdasan Intelektual Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 13, 127–134. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1620/1425>
- Thahir, A. (2014). *Psikologi Belajar Buku Pengantar dalam Memahami Psikologi Belajar*. Penerbit LP2M UIN Raden Intan.

## **MANAJEMEN ASET BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PLEDO KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR**

**Bernafus Adito MG**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
aditobernafus1996@gmail.com

**Yohanes Demu**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
demujohanis@yahoo.co.id

**Maria P. L. Muga**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana  
maria.muga@staf.undana.ac.id

### **ABSTRAK**

Manajemen aset merupakan sebuah komponen yang harus di terapkan dengan baik agar sebuah organisasi atau lembaga dapat berjalan efektif dan efisien dalam meningkatkan pendapatannya. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur tentang bagaimana penerapan manajemen aset. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana penerapan manajemen aset pada Badan Usaha Milik Desa Pledo sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siregar yang memuat lima aspek penting yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Deskriptif), dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa manajemen aset pada Badan Usaha Milik Desa Pledo belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kompetensi ataupun wawasan dari sumber daya manusia mengenai pengelolaan/manajemen aset yang baik, kemudian belum adanya sama sekali proses legal audit yang dilakukan, dan belum adanya pengembangan yang dilakukan berkaitan dengan sistem informasi manajemen aset yang mampu mengakomodasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Pledo.

**Kata Kunci : Manajemen aset, Badan Usaha Milik Desa**

### **ABSTRACT**

*Asset management is a component that must be implemented properly so that an organization or institution can run effectively and efficiently in increasing its revenue. This study was conducted on Village Owned Enterprises (BUMDes) in Pledo Village, Witihama District, East Flores Regency, about how to apply the asset management. The purpose of this study is to describe the storms in which asset management is applied to the Pledo Village Medical and Education Agency in accordance with the theory by Siregar which include several important aspects, namely asset inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization, monitoring and control. The type of the research used in this study was qualitative research (Descriptive) with observation technique, interviews and documentation or pict the picture. Based on the results of the study, it can be concluded that asset management of Pledo Village has not yet going well. This is because there is still a lack of competence or insight from human resources regarding good asset management, then the absence of a single audit process that has been carried out, and the absence of required retaliation related to an asset management information system capable of accommodating all activites carried out by BUMDes Pledo.*

**Keywords : Asset Management, Vilage Owned Enterpries**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kemiskinan penduduk tertinggi, namun dalam beberapa tahun terakhir tingkat kemiskinan di Indonesia menurun. Kendati demikian jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia masih sangat tinggi, dengan jumlah penduduk miskin yang ada di desa lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk miskin yang berada di kota. Kemiskinan merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama masalah kemiskinan yang ada di desa. Salah satu cara yang telah diupayakan oleh pemerintah untuk pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan yang berada di desa adalah dengan melakukan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus ditunjang dengan pendapatan desa yang kuat, maka desa memerlukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar desa nantinya mampu meningkatkan pendapatan desa.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah instrumen kebijakan formal pembangunan bangsa yang meletakkan desa sebagai sebuah komunitas masyarakat indonesia yang mesti diberdayakan guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan demikian Undang Undang tersebut merupakan sebuah ruang kebijakan yang memberikan otoritas kepada desa untuk mengeksplorasi potensi lokalnya untuk pembangunan masyarakat baik secara pribadi maupun kolektif. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina potensi yang ada tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan dari keseluruhan penduduk di Indonesia, sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha

untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat diminimalisir.

Desa dalam batasan otonomi asli dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Desa sangat membutuhkan suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Badan Usaha Milik Desa menjadi andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, sebelum adanya Undang-Undang Desa, sampai dengan tahun 2014 telah didirikan 8.189 BUMDes. Kemudian pada tahun 2015 terbentuk sebanyak 6.274 BUMDes, tahun 2016 terbentuk sebanyak 14.132 BUMDes, tahun 2017 terbentuk sebanyak 14.744 BUMDes, tahun 2018 terbentuk sebanyak 5.874 BUMDes, dan pada tahun 2019 didirikan sebanyak 1.878 BUMDes, bahkan sepanjang pandemi Covid-19 pada 2020 dapat didirikan 43 BUMDes, serta di tahun 2021 sebanyak 6.132 BUMDes, jadi secara keseluruhan telah ada 57.266 BUMDes yang ada di Indonesia (sumber: Mendes PDTT).

**Tabel 1.**  
**Bumdes yang terbentuk dari tahun 2014-2021**

Tahun	BUMDes terbentuk
2014	8.189
2015	6.274
2016	14.132
2017	14.744
2018	5.874
2019	1.878
2020	43
2021	6.132
Total	57.266

*Sumber : Mendes PDTT*

**Tabel 2.**  
**Perkembangan BUMDes di Kabupaten Flores Timur 2014-2019**

Tahun	BUMDes terbentuk
2014-2016	15
2017	24
2018	18
2019	14
Total	71

*Sumber : RKPD Kabupaten Flotim 2021*

Melihat data ini dapat disimpulkan bahwa jumlah BUMDes yang terbentuk tiap tahun mengalami peningkatan, dengan ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola potensi yang ada di desa untuk bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan juga perekonomian masyarakat desa. Namun disamping

terbentuknya BUMDes yang dilakukan oleh desa-desa, banyak juga BUMDes yang tidak dapat mengembangkan potensi yang sudah ada karena keterbatasan atau kurangnya wawasan dari pengelola tentang BUMDes itu sendiri.

Desa Pledo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa pledo terbentuk pada tahun 1964 dari beberapa perkampungan, setelah menjadi sebuah desa kemudian di mekarkan lagi menjadi dua desa yaitu Desa Pledo dan Desa Lamaleka. Sejak berdirinya hingga sekarang Desa Pledo sudah mengalami 10 kali pergantian kepemimpinan. Desa Pledo sendiri cukup dikenal dengan salah satu tempat destinasi wisata tepatnya di dusun 3 yaitu Pulau Pasir Mekko yang masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2020. Desa Pledo ini merupakan salah satu desa yang juga memiliki BUMDes yang didirikan dan diatur sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 20 Tahun 2018 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Desa Pledo memiliki program usaha tambak garam, menyediakan jasa sewa peralatan seperti tenda jadi, kursi, meja, dan penerangan, dan juga memiliki salah satu tempat hiburan yang cukup terkenal dan ramai di kunjungi oleh masyarakat di wilayah Witihama yang diberi nama Kampung Kreatif. Kegiatan usaha yang direncanakan yang akan dikembangkan adalah bidang pariwisata, yaitu destinasi pasir putih Mekko. Melihat dari beberapa usaha yang ada, BUMDes Pledo memiliki cukup banyak aset sehingga diperlukan suatu manajemen aset yang baik sehingga aset-aset yang ada bisa digunakan secara efektif dan efisien.

Manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien (Gima 2013). Manajemen aset ini sendiri sebenarnya terdiri dari 5 tahapan kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan sistem



informasi manajemen aset, dalam pengawasan dan pengendalian aset.

BUMDes Pledo memiliki beberapa aset seperti kas, piutang, bangunan, tanah, dan beberapa properti seperti tenda jadi, kursi dan meja, mesin tambak garam dimana ini merupakan aset-aset dari beberapa usaha yang dimiliki. Tetapi melihat kondisi yang ada bahwa beberapa aset tersebut rupanya belum dikelola dengan baik dalam hal inventarisasi aset, mengoptimalkan aset, pengembangan aset, ataupun pemeliharaan untuk aset.

Peneliti menemukan beberapa masalah yang muncul pada penelitian di BUMDes Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur yaitu, yang pertama bahwa kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kekurangan tenaga kerja. Sumber daya manusia yang rendah sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dalam manajemen aset. Sumber daya manusia yang kurang dalam hal ini adalah pengetahuan tentang manajemen aset. Pengetahuan tersebut bisa berupa pemahaman tentang manajemen aset dan tata cara penatausahaan. Kedua, yaitu ketidaktertiban administrasi di dalam pengendalian inventarisasi seperti pendataan yang masih kurang baik serta sistem yang kurang baik dalam hal pendataan setiap aset sehingga menyebabkan proses pencatatan dan inventaris aset tidak semua diketahui. Ketiga, yaitu kurang optimalnya anggota BUMDes dalam mengembangkan atau mengelola aset seperti tidak menyampaikan laporan barang yang hilang, ataupun pinjam dan rusak. Laporan yang harus dibuat oleh setiap bidang tidak selalu dibuat dan tidak punya data yang harus dicatat dalam laporan pembukuan.

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Manajemen Aset Badan Usaha Milik Desa di Desa Pledo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur”.

## **KAJIAN TEORI**

### **Otonomi Daerah**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan Undang-Undang yang berlaku.

### **Desa**

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini pun sama dengan apa yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa, namun hal ini akan terlihat sedikit berbeda jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

### **Badan Usaha Milik Desa**

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-

undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi badan usaha yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat,serta memberikan penguatan terhadap pendapatan desa.

### **Manajemen Aset**

Manajemen Aset ini sendiri dibagi dalam 5 (lima) tahapan kerja yang saling berhubungan dan terintegrasi yaitu: Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, Optimalisasi Aset dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset, (Siregar,2004) . Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik, dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.
- 2) Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal, strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.
- 3) Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut

akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

- 4) Optimalisasi aset merupakan satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai diidentifikasi dan dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah maupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.
- 5) Pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada sebuah organisasi. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Melalui SIMA transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangatlah terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek itu akan diakomodasi dalam sistem dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian, sehingga setiap penanganan terhadap satu aset termonitor jelas mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif (Gumilang, 2016). Berdasarkan keterangan ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu dan hasilnya lebih menekankan makna. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menyandingkan penerapan manajemen aset pada BUMDes Pledo berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Siregar. Sehingga jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah metode yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Inventarisasi Aset

Menurut teori yang dikemukakan oleh Siregar tentang inventarisasi aset bahwa proses kerja yang dilakukan pada inventarisasi aset adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi secara sistematis sesuai dengan tujuan manajemen aset. Inventarisasi aset merupakan suatu hal yang sangat penting sekali dalam hal manajemen atau dalam mengelola aset. Inventarisasi dikatakan sangat penting karena terdapat kegiatan pencatatan yang berguna untuk mengetahui jumlah barang atau aset yang dimiliki oleh sebuah entitas.

Tahapan inventarisasi aset ini BUMDes Pledo belum sepenuhnya melakukannya, dikatakan demikian karena selain BUMDes Pledo sudah melakukan inventarisasi aset dengan cukup baik mulai dari pendataan

terhadap aset yang dimiliki saat dilakukan pengadaan, kemudian memberikan penomoran atau kode terhadap barang/aset yang dimiliki, namun berdasarkan teori, BUMDes Pledo belum melakukan tahap pengelompokan dan masih melakukan pencatatan terhadap aset-aset yang ada dengan sistem pencatatan yang sederhana. Sesungguhnya dengan adanya kegiatan inventarisasi yang baik mempunyai manfaat bagi BUMDes Pledo sendiri, agar dapat mengendalikan, memanfaatkan, mengamankan, serta mengawasi setiap aset yang dimiliki, kemudian dengan adanya inventarisasi yang baik juga dapat mengetahui bahwa aset tersebut sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Sehingga yang menjadi permasalahan pada aspek inventarisasi ini adalah masih minimnya pengalaman pengelola BUMDes sehingga proses pencatatan masih menggunakan sistem yang sederhana dan belum terlalu maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuyu (2017), yang menyatakan bahwa inventarisasi atau pengelolaan BUMDes belum maksimal namun cukup memadai dikarenakan proses inventarisasi atau pencatatan masih menggunakan metode yang sederhana.

### 2. Legal Audit

Teori Siregar mengatakan bahwa aspek legal audit sebagai lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait aset pada sebuah lembaga. Pada proses legal audit, seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa proses legal audit yang dilakukan dengan tertib inventarisasi akan menyajikan data secara valid.

Tahapan legal audit yang dilakukan oleh BUMDes Pledo kurang berjalan dengan baik bahkan tidak dijalankan sama sekali, dibuktikan dengan pengakuan dari berbagai kutipan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Salah satunya adalah mereka beranggapan bahwa tidak ada masalah

dengan proses ini sehingga tidak di data sama sekali. Pada dasarnya untuk melakukan inventarisasi itu menjadi tertib kadang terkendala dalam hal pelaksanaan legal audit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Demetouw,dkk 2017 yang menyatakan bahwa legal audit penting sekali berupa status penguasaan aset, ataupun pengalihan aset, yang bertujuan memberikan kepastian kepemilikan aset, namun pada penelitian ini kurang ada pengaruh yang signifikan dari legal audit. Pada penelitian ini dikatakan tidak dijalankan karena kurangnya kesadaran mengenai hak milik atau kepastian kepemilikan, para pengelola BUMDes beranggapan bahwa tidak ada masalah, namun akan bermasalah ketika dilakukan audit.

### 3. Penilaian Aset

Tahapan penilaian aset menurut teori Siregar merupakan sebuah tahap dalam manajemen aset yang tidak terlepas dari dua hal sebelumnya yaitu inventarisasi dan legal audit. Penilaian barang atau aset merupakan sebuah proses ilmiah yang dilakukan oleh seorang atau tim penilai untuk mendapatkan estimasi nilai suatu barang dengan melihat berbagai aspek seperti lokasi, jenis, merk, tipe, jumlah, ukuran, kondisi dan kelengkapan data lainnya untuk mendukung nilai suatu aset.

Berdasarkan paparan wawancara diatas dapat diketahui bahwa BUMDes Pledo belum sepenuhnya melakukan proses penilaian yang benar dan optimal terhadap aset-aset yang dimiliki. Harusnya ada tim penilai yang bersifat independen untuk menilai atau mengestimasi nilai dari aset terkait berdasarkan aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi, namun hingga saat ini belum adanya tim penilai yang turun untuk menilai aset-aset yang dimiliki sehingga BUMDes masih menggunakan penafsiran orang tertentu saja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufly, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa penilaian aset penting dalam hal memperoleh informasi nilai aset untuk keberlangsungan sebuah entitas. Hal ini belum dilakukan sepenuhnya karena

kurang kompetennya pengelola BUMDes dalam melakukan penilaian terhadap aset.

### 4. Optimalisasi Aset

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Siregar bahwa optimalisasi aset merupakan suatu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini aset dikelompokkan menjadi aset berpotensi dan aset yang tidak berpotensi. Aset berpotensi adalah aset-aset yang memiliki unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Sedangkan aset yang tidak berpotensi atau yang tidak dapat dioptimalkan harus dicari faktor penyebabnya.

Proses optimalisasi aset pada BUMDes Pledo belum dijalankan sepenuhnya, walaupun sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari aset berpotensi yang digunakan dengan baik dalam artian bahwa aset BUMDes sudah dipergunakan dan dimanfaatkan secara maksimal. Namun pada tahap ini masih terdapat kurang kesadaran atau inisiatif pengelola BUMDes tiap unit untuk memberikan laporan terkait dimanfaatkannya aset-aset yang ada. Dalam sebuah lembaga usaha, aset-aset yang dimiliki harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai fungsinya masing-masing, karena aset yang berpotensi apabila dioptimalkan dalam penggunaannya maka akan menambah pendapatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) yang menegaskan bahwa optimalisasi aset diharapkan dalam waktu singkat dapat menghasilkan penggunaan dan pemanfaatan aset yang efektif dan efisien.

### 5. Pengawasan dan Pengendalian.

Teori Siregar mengatakan bahwa salah satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja pada tahap pengawasan dan pengendalian adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), sehingga melalui SIMA transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangatlah terjamin tanpa

perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

Proses pengawasan dan pengendalian belum dijalankan sepenuhnya oleh BUMDes Pledo, dikatakan demikian karena pengawasan yang dilakukan selama ini lebih banyak ke pemeriksaan terhadap dokumen pencatatan atau administratif pembukuan, sehingga perlu adanya koordinasi yang baik juga dengan pengawas lembaga untuk mengetahui secara detail keadaan aset BUMDes Pledo yang sebenarnya. Lebih lanjut terkait pengendalian BUMDes juga belum melakukan sebuah sistem informasi yang baik dalam hal ini Sistem Informasi Manajemen Aset yang mampu mengakomodasi keempat aspek yang lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufly, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian telah berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Adapun penelitian Moses (2017) menegaskan bahwa adanya pengaruh positif antara pengawasan dan pengendalian aset terhadap optimalitas sebuah aset.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Inventarisasi aset pada pokok pengelompokan belum dijalankan dengan baik dikarenakan kurang atau minimnya pengetahuan pengelola BUMDes terkait dengan proses pencatatan yang baik dan benar. Jadi pokok permasalahan terkait hal ini terletak pada wawasan sumber daya manusia yakni pengelola BUMDes terkait dengan proses pembukuan, sehingga perlu adanya sosialisasi dan bimbingan teknis dari pihak pemerintah yang bermitra dengan pemateri berkompeten agar mampu menambah wawasan tentang manajemen aset yang baik.
2. Belum adanya proses legal audit yang dilakukan oleh BUMDes Pledo, padahal pokok manajemen aset ini sangat penting sekali berkaitan dengan kepastian hukum kepemilikan dari aset-aset yang ada.

3. Aset yang berpotensi sudah dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh BUMDes Pledo namun karena kurangnya kesadaran dan kurangnya kompetensi atau wawasan sumber daya manusia dalam mengembangkan aset-aset yang ada di desa Pledo.
4. BUMDes Pledo belum melakukan sebuah sistem informasi manajemen aset dengan baik pada tahap pengawasan dan pengendalian, padahal dengan sistem informasi ini keempat aspek yang lain akan diakomodasi dalam sebuah sistem, sehingga setiap penanganan terhadap suatu aset termonitor jelas mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya.
5. BUMDes Pledo pada umumnya sudah melakukan kegiatan manajemen aset namun sesuai temuan belum sepenuhnya dijalankan dan ada satu hal yang bahkan tidak dijalankan sepenuhnya yaitu berkaitan dengan proses legal audit.

### Saran

1. Bagi Objek Penelitian
  - a. Agar proses pencatatan berjalan secara maksimal dan pengembangan usaha untuk dapat menambah pendapatan, maka dibutuhkan wawasan yang kuat mengenai badan usaha milik desa, sehingga diperlukan kerjasama dengan pihak pemerintah desa untuk dapat meningkatkan kompetensi mengenai manajemen aset melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan yang berkesinambungan dengan pemateri yang berkompeten di bidang manajemen/pengelolaan aset pada sebuah lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa ini.
  - b. Diharapkan untuk BUMDes agar mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen aset karena selama ini BUMDes masih menggunakan informasi dari mulut ke mulut. Melalui sistem ini transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangatlah terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

## 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam pencarian informasi terkait manajemen aset Badan Usaha Milik Desa, dengan tetap membandingkan atau menyesuaikan dengan referensi lainnya yang serupa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga informasi dan data-data yang disajikan rasanya masih memiliki kekurangan karena keterbatasan peneliti, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan lebih banyak teknik pengumpulan data seperti *focus group discussion (FGD)*, studi kasus (*case study*), ataupun angket (kuesioner), untuk menjamin keakuratan informasi secara utuh dan penjelasan yang lebih lengkap.

### DAFTAR PUSTAKA

- Demetouw, Moses dkk. 2017. "Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jayapura." *Jayapura: Universitas Cenderawasih*.
- Gima Sugiama. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Mufly mahiry, dkk. 2020. "Manajemen BUMDes Tridadi Makmur Desa Tridadi Kabupaten Sleman Perspektif Maqasid Syariah". Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan."
- Peraturan Desa. n.d. "Peraturan Desa Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)."
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2015. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran."
- Peraturan Pemerintah. 2014. "Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa."
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2014. "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa."
- Siregar, Doli. D. 2004. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang - undang. 1999. "Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Desa."
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. n.d. "Tentang Desa."
- Yayu Putri Senjani. 2017. "Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa." *Yogyakarta: Sharia Accounting, Faculty of Islamic Economic and Business, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.

## **MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI DI MASJID BERBASIS NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL GORONTALO**

**Mohamad Anwar Thalib**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo  
mat@iaingorontalo.ac.id

**Sri Mandalika Mosu**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo  
smanda@gmail.com

**Siskawati Yunus Njuu**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo  
siskawati@gmail

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik akuntansi masjid berbasis nilai-nilai budaya Islam Gorontalo. Jenis metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama modal pengoperasian kegiatan masjid bersumber dari pemberian masyarakat dan jamaah masjid; kedua, modal tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan ibadah dan merenovasi bangunan masjid; ketiga, bentuk akuntabilitas penggunaan dana dilakukan oleh pengurus masjid melalui mencatat akuntansi dengan sederhana dan melaporkan penggunaan dan pemasukan dana setiap hari Jumat. Akuntansi masjid berupa pemberian dana, penggunaan dana, pencatatan sederhana, serta akuntabilitas dana digerakkan dengan semangat keikhlasan (*ihilasi*) dan saling percaya (*paracaya*), dan tanggung jawab (*dudaha*). Nilai-nilai tersebut merupakan nasihat yang sering disampaikan oleh para orang tua (tua-tua) melalui ungkapan (*lumadu*) “*diila o’onto, bo wolu-woluwo*” artinya tidak kelihatan tetapi ada.

***Kata kunci: akuntansi, masjid, akuntabilitas, budaya, Gorontalo, pencatatan.***

### **ABSTRACT**

*This study aims to reveal the mosque's accounting practices based on Gorontalo Islamic cultural values. The type of method used is qualitative, with data analysis techniques using the Miles and Huberman model. The results showed that; First, the capital for operating mosque activities comes from donations from the community and mosque congregations; second, the capital is used to finance worship activities and renovate mosque buildings; third, the form of accountability for the use of funds is carried out by mosque administrators through simple accounting records and reporting the use and income of funds every Friday. mosque accounting practices in the form of giving funds, using funds, simple recording, and accountability of funds are driven by the spirit of sincerity (*ihilah*) and mutual trust (*paracaya*), and responsibility (*dudaha*). These values are advice that is often conveyed by parents through the expression (*lumadu*) "*diila o'onto, bo wolu-woluwo/invisible but exists.**

***Keywords: mosque, accounting, accountability, Gorontalo, culture, recording.***

## PENDAHULUAN

Praktik akuntansi masjid berbasis nilai-nilai kearifan lokal penting untuk dilakukan hal ini disebabkan oleh beberapa hal mendasar **pertama** untuk mengungkap praktik akuntansi di masjid berbasis kearifan lokal Gorontalo. Tujuan pertama ini berangkat dari pemahaman bahwa pada dasarnya setiap tempat memiliki versi akuntansi nya tersendiri, hal ini disebabkan bentuk dan praktik akuntansi menyesuaikan dengan nilai-nilai di lingkungan tersebut (Triyuwono, 2015a). Namun sayangnya, hasil kajian akuntansi berbasis nilai budaya masih jarang dilakukan. Hal ini dapat dilihat melalui data publikasi riset akuntansi di jurnal terakreditasi nasional (SINTA). Pada tahun 2020 terdapat 3.692 jumlah riset akuntansi yang diterbitkan di jurnal akuntansi terakreditasi oleh nasional (SINTA), namun dari jumlah tersebut hanya terdapat 17 riset akuntansi berbasis nilai kearifan lokal, sisanya merupakan riset akuntansi yang terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal<sup>1</sup>.

Lebih lanjut, poin **kedua** menjadikan tema riset ini penting untuk dikaji adalah untuk melestarikan praktik akuntansi di masjid yang hidup dengan nilai-nilai kearifan lokal. Mungkin ada yang bertanya mengapa perlu dilestarikan? Hal ini disebabkan ilmu/konsep/standar akuntansi bukan saja dibentuk berdasarkan nilai dimana ia dipraktikkan, namun pada akhirnya akuntansi juga dapat membentuk lingkungan dimana ia diadopsi dan diimplementasikan. Saat ini, teori/konsep/standar akuntansi yang dipelajari dan diimplementasikan di lapangan merupakan produk yang diadopsi dari barat (Kamayanti & Ahmar, 2019). Artinya saat ini teori/konsep/standar akuntansi yang sementara diserap di dunia pendidikan dan diimplementasikan dalam dunia kerja merupakan akuntansi berbasis nilai-nilai modern diantara adalah egoisme, utilitarian, dan kapitalisme (Triyuwono, 2015b). Nilai-nilai barat inilah yang berpeluang untuk memarginalkan bahkan menghilangkan

akuntansi lokal (Nurindrasari, Triyuwono, & Mulawarman, 2019).

Kajian tentang praktik akuntansi masjid telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, misalnya saja (Azwari, 2018; Firdaus & Yulianto, 2018; Hidayatullah, Sulistiyo, & Hisamuddin, 2019; Qomar, et al., 2019; Rini, 2019; Siregar, 2018), namun sayangnya kajian tersebut masih memfokuskan pada teknik dan kalkulasi dari akuntansi. Berbeda dengan riset sebelumnya, pada kajian ini peneliti memfokuskan pengungkapan praktik akuntansi di masjid bukan terbatas pada teknik dan kalkulasi namun juga nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Gorontalo.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka yang menjadi pertanyaan riset ini adalah bagaimanakah masyarakat Gorontalo mempraktikkan akuntansi masjid? Bertolak dari rumusan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan cara masyarakat Gorontalo mempraktikkan akuntansi masjid.

## KAJIAN TEORI

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba (Nordriawan, 2006). Sebagai sebuah organisasi nirlaba, tentunya masjid mengelola dana yang diterima dari pemerintah, perusahaan dan donatur (masyarakat). Organisasi nirlaba memperoleh sumberdaya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumberdaya yang diberikan (Nordriawan, 2006).

Kajian tentang akuntansi masjid telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah (Qomar et al., 2019) melalui riset tentang penerapan PSAK 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi pada masjid menemukan bahwa bentuk laporan keuangan Zakat, Infak/Sedekah pada masjid At-Taqwa Tumpurejo belum sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PSAK 109, dimana laporan keuangan masjid masih sederhana yaitu hanya terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, sehingga akan menghasilkan saldo akhir.

<sup>1</sup><https://sinta.ristekbrin.go.id/journals?q=akuntansi&search=1&sinta=&pub=&city=&issn> (dimodifikasi)



Selanjutnya (Rini, 2019) melalui riset yang berjudul pengelolaan keuangan masjid di Jabodetabek menemukan bahwa pengurus masjid sudah mempunyai laporan keuangan, namun hanya sebagian masjid yang mempunyai laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Jenis laporan keuangan yang dibuat sebagian besar hanya laporan kas.

Lebih lanjut, (Hidayatullah et al., 2019) melalui kajian tentang analisis rekonstruksi penyusunan laporan keuangan masjid menemukan bahwa Masjid Agung Baiturahman telah melakukan pelaporan keuangan yang lumayan baik yaitu laporan yang dibuat oleh bendahara sudah tersistem dalam excel.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2015). (Creswell, 2014) merumuskan beberapa alasan mendasar tentang memilih penelitian penelitian kualitatif: pertama adanya permasalahan atau isu yang perlu dieksplorasi. Tujuan penelitian ini sejalan dengan alasan pertama yang disampaikan oleh Creswell yaitu untuk mengungkap praktik akuntansi masjid di Gorontalo serta nilai-nilai kearifan lokalnya.

Kedua membutuhkan suatu pemahaman yang detail dan lengkap tentang permasalahan tersebut. Senada dengan alasan kedua ini saya membutuhkan data yang lengkap dan juga detail, data ini akan didapat dengan cara terjun langsung dan mengamati bagaimana para pengurus masjid mempraktikkan akuntansi. Ketiga melakukan penelitian kualitatif ketika kita ingin memberdayakan individu untuk menyampaikan cerita mereka, mendengarkan suara mereka dan meminimalkan hubungan kekuasaan selama proses penelitian. Pada

penelitian ini untuk dapat menjawab masalah, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah wawancara secara mendalam dengan informan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara pengurus masjid di Gorontalo mempraktikkan akuntansi. Praktik akuntansi yang digerakkan oleh semangat nilai-nilai budaya Islam masyarakat setempat hingga berujung pada kesadaran akan Sang Maha Pencipta.

### **Lokasi dan Informan penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di masjid Al-Khairat yang terdapat di desa Bongohulawa, Kecamatan Lomboto, Kabupaten Gorontalo. Peneliti memilih masjid Al-Khairat disebabkan setiap minggu para pengurus masjid ini rutin untuk mengumpulkan dana sumbangan dari masyarakat dan jama'ah serta melaporkannya secara lisan tepat sebelum pelaksanaan sholat Jum'at. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu masyarakat lingkungan Bongolulawa berikut ini:

“iya, setiap hari Jumat ada pemberitahuan oleh ketua takmir soal pengeluaran dan pemasukan keuangan, ada setiap hari Kamis itu ada celengan, jadi setiap hari Kamis celengan itu wajib diisi, jadi masyarakat *Bongohulawa* di sini itu sudah percaya...”

Kutipan dari informan bernama ibu Ika sebelumnya memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa masjid Al-Khairat memiliki program untuk pengumpulan sumbangan serta pelaporan penggunaan dana setiap minggunya. Pada cuplikan sebelumnya juga menunjukkan adanya rasa percaya masyarakat Bongohulawa tentang pengelolaan dana masjid. Lebih lanjut, alasan mendasar berikutnya menjadikan lokasi tersebut sebagai situs penelitian adalah keunikan kebudayaan masyarakat setempat yaitu “*Adati Hula-Hula Syareati, Syareati Hula-hula to Kitabullah*” (adat berdasarkan pada syariat, syariat berdasarkan pada kitab Allah (Al-Quran)) (Baruadi & Eraku, 2018). Artinya, setiap aktivitas kehidupan masyarakat setempat (termasuk mempraktikkan akuntansi di

masjid) haruslah didasarkan pada nilai-nilai dari ajaran agama Islam. Informan dalam riset ini berjumlah tiga orang yaitu bapak Hayyum Koem sebagai ketua takmirul masjid, bapak Yunus Haidari sebagai pengurus masjid, dan ibu Ika Pembengo sebagai salah satu warga sekaligus jama'ah dari masjid Al-Khairat. Ketiga informan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* atau metode penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu (Sugiyono, 2012). Peneliti menjadikan ketiganya sebagai informan disebabkan ketiga memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang praktik akuntansi yang di praktikkan di masjid Al-Khairat, selain itu, ketiga informan memiliki waktu luang dan bersedia untuk berbagi informasi tentang tema riset ini.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Riset ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi (Thalib, 2022b). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2015). Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara dimana peneliti telah menyiapkan instrument berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan, sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2012). Teknisnya, saat di lapangan, peneliti menggali informasi berdasarkan daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya, sementara itu, jika terdapat hal-hal penting di luar daftar pertanyaan, maka hal itu juga akan peneliti telusuri lebih lanjut pada informan.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012).

Dalam riset ini, dokumen yang dimaksudkan adalah bentuk catatan akuntansi atas aktivitas keuangan di masjid. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data berupa observasi partisipasi pasif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi ini maka data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak (Sugiyono, 2012). Teknisnya, dalam pengumpulan data, peneliti sebatas mengamati (tidak terlibat langsung) bagaimana para pengurus masjid mempraktikkan akuntansi.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012). Tahapan pertama adalah reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2012). Teknisnya setelah mengumpulkan data di lapangan, maka peneliti memilih data yang berhubungan dengan praktik akuntansi di masjid Al-Khairat serta membuang data-data yang tidak relevan dengannya. Tahapan kedua adalah penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya (Sugiyono, 2012). Teknisnya, dalam riset ini, peneliti akan menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tahapan ketiga adalah penarikan kesimpulan, dalam riset kualitatif kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Sugiyono, 2012). Teknisnya, setelah mereduksi dan menyajikan data, maka peneliti akan menarik kesimpulan tentang bagaimana bentuk dan praktik akuntansi di masjid yang diimplementasikan oleh pengurus masjid Al-Khairat Gorontalo, serta nilai-nilai budaya

Islam apa saja yang menjadi semangat dari praktik akuntansi tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Masjid Al-Khairat Dibangun di atas Tanah Wakaf**

Para informan menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui dengan pasti kapan masjid Al-Khairat sendiri dibangun. Tetapi menurut penjelasan dari pengurus masjid, tanah yang dipakai untuk membangun masjid itu merupakan tanah wakaf dari keluarga Tanango. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Yunus Haidari:

“Masjid itu dibangun di atas tanah wakaf itu saja yang jelas, tetapi kapan tahun dibangunnya itu tidak tahu. Tetapi perenovasian pertama itu yang kami tahu, tetapi asal usul dari masjid itu kapan didirikan, itu yang mengetahui sudah meninggal semua, yang mengetahui sejarah tentang masjid itu. Saya juga kurang mengetahui tentang perenovasian saya *kan* waktu itu masih kecil, saya belum mengetahui tentang aktivitas masjid ketika renovasi itu..., soalnya sudah berganti-ganti pengurus masjid ini jadi sudah tidak tahu lagi, hanya yang jelas masjid itu berdiri di atas tanah wakaf keluarga Tanango.”

Pada penjelasan bapak Yunus sebelumnya, peneliti memahami bahwa tanah yang menjadi pembangunan dari masjid Al-Khairat merupakan wakaf dari keluarga Tanango. Masjid ini telah berdiri sejak lama, dan telah mengalami pergantian pengurus dari tahun ke tahun, sehingga pengurus masjid sekarang yaitu bapak Yunus tidak mengetahui dengan jelas kapan pertama kali masjid ini dibangun. Selanjutnya, bapak Hayyum Koem menjelaskan bahwa masjid Al-Khairat sendiri dibangun di tanah wakaf dan direnovasi sekitar tahun 1996 dan sebelum perenovasian masjid itu belum memiliki teras, berikut penjelasan beliau:

“Mengenai bangunan masjid itu saya tidak begitu tahu, karena saya juga hanya sebagai pendatang,

saya mulai tinggal disini pada tahun 1990. Tetapi hanya saja masjid waktu itu belum begini keadaanya fisiknya. Kemudian kami renovasi, tetapi mengenai bangunannya itu saya tidak mengetahui. Kami juga di masjid ada takmir lain, mereka juga tidak tahu kalau tahun berapa pertama kali masjid itu dibangun. Hanya saja tanahnya itu tanah wakaf, ada orang yang mewakafkan tanah itu. Ada juga sertifikatnya tetapi tidak ada sama kami sertifikat itu, sertifikatnya itu berada di Kementerian Agama. Saya tahun 90an masuk sini jadi takmir, tetapi keadaan masjid belum begitu, belum terdapat teras, kemudian kami rehap. Tahun renovasi itu sekitar tahun 1996”.

Berdasarkan penuturan dari bapak Hayyum Koem sebelumnya, peneliti memahami bahwa sebelum beliau pindah di daerah ini, masjid Al-Khairat telah berdiri, sehingga beliau tidak mengetahui kapan pertama kali masjid ini dibangun. Akan tetapi, masjid ini pertama kali direnovasi sekitar tahun 1996.

### **Praktik Akuntansi Modal untuk Operasional Masjid**

Modal atau dana yang selama ini digunakan oleh para pengurus masjid berasal dari sumbangan masyarakat di kotak amal, infaq, dan dana donatur. Selanjutnya setiap hari Kamis masyarakat setempat rutin menyumbangkan dana untuk kegiatan operasional masjid, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Hayyun Koem berikut ini:

“kalau sumber keuangan masjid kami dapat melalui infak, dan ada dua yang pertama via kotak amal setiap hari Jumat, dan ada pemungutan sedekah langsung ke rumah-rumah masyarakat, setiap hari Kamis yang sudah disepakati oleh masyarakat, serta ada dana donatur setiap tahun untuk kegiatan pelaksanaan buka

puasa penerimaannya setiap kelompok ditetapkan Rp 150.000”

Berdasarkan hasil wawancara bapak Hayyum Koem peneliti memahami bahwa sumber dana atau modal untuk kegiatan operasional masjid diperoleh dari sumbangan masyarakat setempat. Sumbangan tersebut biasanya diberikan oleh masyarakat setempat pada saat melaksanakan ibadah sholat Jum'at, sementara itu, pada hari Kamis, pengurus masjid berkunjung ke masing-masing rumah warga untuk menjalankan kotak amal. Kegiatan infak setiap hari Kamis merupakan program masjid yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, pada cuplikan sebelumnya juga memberikan penjelasan tentang kegiatan bulan suci Ramadhan, pada moment tersebut telah ada donatur tetap untuk kegiatan buka puasa di masjid, dimana setiap kelompok menetapkan sumbangannya berjumlah Rp 150.000.

Penuturan dari bapak Hayyum sebagai pengurus masjid seirama dengan yang dijelaskan oleh masyarakat setempat yaitu ibu Ika, berikut penuturan beliau:

”iya, setiap hari Jumat ada pemberitahuan oleh ketua takmir soal pengeluaran dan pemasukan keuangan, ada setiap hari Kamis itu ada celengan, jadi setiap hari Kamis celengan itu wajib diisi

Cuplikan wawancara sebelumnya memberikan pemahaman pada peneliti bahwa pengurus masjid setiap minggunya membuka donasi untuk pengoperasian kegiatan di masjid, sementara itu juga, di hari kamis terdapat kegiatan celengan, dimana pengurus masjid mendatangi satu masing-masing rumah warga untuk meminta sumbangan. Selanjutnya, para pengurus masjid, memperoleh bantuan dana dengan cara pengiriman surat permohonan bantuan dana kepada para jama'ah yang mau menjadi donatur jama'ah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Hayyum Koem:

“kalau ada dana donator yang lain masuk ada dana donator jama'ah, setelah dibuat sebelum pengelolaan masing-masing jama'ah itu dikirimkan surat, untuk siapa yang mau menjadi sebagai donator, akan

tetapi tidak semua jama'ah merespon, mungkin hanya sekitar 30% jama'ah yang merespon. Dan sampai sekarang dana donator masih berjalan, serta dana donator ditetapkan minimal 10.000 perbulan, akan tetapi ada yang memberikan sebanyak 20.000, 25.000, bahkan ada yang sampai 100.000”

Berdasarkan cuplikan wawancara sebelumnya, peneliti memahami bahwa para pengurus masjid membentuk beberapa anggota masyarakat sebagai donatur tetap untuk masjid, kemudian mengirimkan surat permohonan infak dan sedekah kepada para donatur tersebut. Dari sejumlah surat yang dikirimkan, yang merespon bantuan dana tersebut sekitar 30%. Sampai sekarang dana donatur tetap ini masih berjalan. Para pengurus masjid menetapkan minimal pemberian adalah Rp 10.000 per bulannya, namun realisasinya, para donatur memberikan melebihi dari jumlah tersebut.

### **Praktik Akuntansi Biaya Masjid**

Transaksi pengeluaran yang terjadi di masjid Al-Khairat diantaranya adalah membayar imam masjid, *cleaning service*, *muazin* di masjid tersebut. Pembayaran biaya dilakukan setiap bulannya dan biaya tersebut diambil dari sumbangan masyarakat, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hayyum Koem:

“uang donator kami gunakan untuk membayar para petugas untuk imam, *muazin*, itu juga tergantung dengan keuangan, artinya kalau saldo masih mencukupi, kalau imam masjid digaji tetap setiap bulan, kalau imam jama'ah ada yang *muazin* itu dia juga sekaligus sebagai *cleaning servis*, hanya saja ketika ada uang lebih ada anak-anak yang membantu untuk *muazin* itu diberikan upah sebesar 150.000 tetapi tidak setiap bulan, saldonya itu dikasih. Tetapi kalau imam jama'ah itu yang sudah ditetapkan setiap bulan itu di berikan sebesar Rp 500.000. Sebelumnya ada dua orang tetapi karena dananya sudah berkurang jadi saya kurangi,

hanya satu orang saja, jadi gajinya dapat dipenuhi tiap bulan, tetapi kadang-kadang sampai dua tiga bulan mulai, artinya tidak ada tuntutan apapun dari mereka, karena itu kan kebijakan dari pengurus, mereka juga tidak mengharapkan gaji tersebut, terus jika ada kebutuhan masjid kebetulan di masjid ada genset maka jika tidak ada listrik maka kami membeli bensin, oli, balon (lampu) dan kebutuhan-kebutuhan masjid lainnya.”

Bertolak dari cuplikan wawancara sebelumnya, peneliti memahami bahwa uang yang dikumpulkan oleh pengurus masjid dari masyarakat dan jama'ah masjid akan digunakan oleh mereka untuk membiayai kegiatan ibadah dan operasional lainnya di masjid. Dana donatur tersebut secara spesifik akan digunakan untuk membayar imam, muazin, serta petugas kebersihan. Untuk muazin akan diberikan upah Rp 150.000 per bulannya, sementara imam masjid Rp 500.000 per bulannya, lebih lanjut, dana donatur juga akan digunakan untuk mengoperasikan mesin genset, membeli bola lampu dan kebutuhan lainnya. Khusus untuk imam, muazin, dan petugas kebersihan biasanya dibayarkan setiap bulannya, namun bapak Hanyyum Koem menegaskan bahwa ketiganya sebenarnya tidak mengharapkan ataupun menuntut untuk dibayar, hal ini disebabkan menjadi imam, mengumandangkan azan, serta membersihkan masjid merupakan dorongan hati untuk beribadah kepada-Nya.

Sementara itu terdapat juga pengeluaran setiap minggu yang dilakukan oleh petugas masjid. Pengeluaran itu dibayarkan pada pelaksana sholat Jumat. Hal ini memang telah ditetapkan oleh para pengurus masjid, berikut merupakan penjelasan bapak Hayyun Koem:

“Terus begini ada juga pengeluaran setiap minggu, bagi petugas Jumat khotib, dan bilal. Khotib dan imam itu merangkap Rp 75.000 setiap pelaksanaan hari Jumat, hari Jumat itu ada khotib dan imam kan? Khotib, imam itu di bayar Rp 75.000, terus

bilal itu dibayar Rp 25.000, hanya dua orang”

Berpijak pada penuturan sebelumnya, peneliti memahami bahwa terdapat pengeluaran biaya tetap setiap minggu nya. Biaya itu adalah untuk pembayaran petugas sholat Jum'at. Untuk khotib sekaligus imam dibayar dengan jumlah Rp 75.000 sementara bilal Rp 25.000.

### **Praktik Akuntabilitas Keuangan Masjid**

Cara pengurus masjid mempertanggungjawabkan keuangan berupa mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hayyun Koem :

“Laporan keuangan itu bisa lewat buku. Memang jamaah juga tidak meminta pertanggungjawaban, artinya tidak secara langsung mereka minta, tetapi hanya karena mempertanggungjawabkan agar ada transparansi agar suatu saat ketika mereka meminta laporan keuangan, mereka *kan* tidak akan ragu, kalau di masjid-masjid lain saya dengar tidak ada laporan seperti itu ketika menerima pemasukan, tidak ada laporan pertanggungjawaban seperti itu, saya ikut di masjid Agung karena disana setiap minggu itu juga dilaporkan, masjid di kabupaten Baiturahman, setiap minggu itu pendapatan, infak, sedekah, itu dilaporkan, kemudian penggunaan, pengeluaran.”

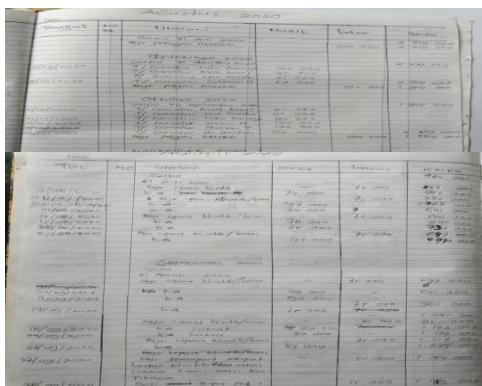
Bertolak dari penuturan bapak Hayyum sebelumnya, peneliti memahami bahwa bentuk pertanggungjawaban dari dana yang diberikan oleh masyarakat dan jamaah adalah bapak Hayyum melakukan pencatatan akuntansi untuk seluruh pengeluaran dan penerimaan sumbangan. Bapak Hayyum menegaskan bahwa masyarakat ataupun jamaah tidak meminta pertanggungjawaban dalam bentuk catatan akuntansi, namun hal tersebut beliau lakukan atas dasar kesadaran dan tanggungjawab beliau sebagai penerima amanah. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi, jika ada donatur yang menanyakan alur pemasukan dan

pengeluaran dana, maka beliau bisa menunjukkan dalam bentuk catatan yang lengkap. Bentuk pencatatan dan pelaporan keuangan ini terinspirasi dari metode pertanggungjawaban oleh pengurus masjid besar Baiturahman.

Lebih lanjut, bapak Hayyum menjelaskan bahwa untuk pembuatan buku laporan keuangan maka beliau membentuk buku laporan keuangan berdasarkan beberapa kolom bagian seperti yang dijelaskan oleh bapak Hayyum Koem:

“Catatan laporan keuangan itu dalam bentuk kas, tanggal, nomor urut uraian, pemasukan, pengeluaran, saldo atau akreditas, cuman tidak ada laporan dalam bentuk bulanan laporan yang kita laporkan itu tersusun dengan baik. Akan tetapi buku kasnya itu ada, serta setiap jumat itu dilaporkan pada jama’ah penerimaan sekian, pengeluaran sekian, saldo sekian, dengan tiap minggu itu ada laporan dalam bentuk lisan, dan dibacakan sebelum Juma’at”

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, peneliti memahami bahwa bentuk pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pengurus masjid merupakan pencatatan akuntansi yang sederhana. Catatan tersebut terdiri dari pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Bapak Hayyum menjelaskan juga bahwa informasi keuangan ini beliau sampaikan dalam bentuk lisan atau dibacakan setiap sebelum sholat Jum’at. Gambar 1 di bawah ini merupakan dokumentasi dari pencatatan akuntansi masjid

The image shows two pages of a handwritten financial ledger. The pages are filled with text organized into columns and rows. The columns likely represent different categories of financial transactions such as income, expenses, and balances. The handwriting is in Indonesian. The top page has a header section with some printed text, and the bottom page continues the ledger entries.

**Gambar 1.** Bentuk pencatatan akuntansi masjid Al-Khairat

Pada dokumentasi sebelumnya merekam bentuk pencatatan akuntansi masjid yang dicatat secara sederhana oleh bapak Hayyum. Bentuk pencatatan tersebut terdiri dari pertama kolom tanggal yang berfungsi untuk mengisi data tentang kapan donasi tersebut diterima ataupun digunakan. Kolom kedua tentang uraian, bagian ini berfungsi untuk mengisi informasi tentang nama-nama donatur yang menyumbangkan dana dan juga keterangan penggunaan dana. Kolom ketiga yaitu masuk, kolom ini berfungsi untuk mencatat jumlah dana yang ditemukan oleh pengurus masjid. Kolom keempat keluar, kolom ini berfungsi untuk merekam jumlah pengeluaran dana. Kolom kelima saldo, kolom ini digunakan oleh bapak Hayyum untuk mencatat sisa dana saat itu.

Meskipun akuntabilitas dari penggunaan masjid hanya dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu mengumumkan setiap hasil dari pengeluaran, pemasukan, dan transaksi-transaksi lainnya tepat sebelum pelaksanaan solat jumat, tetapi masyarakat setempat tetap percaya dengan penggunaan dan pengelolaan dana masjid. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Ika Pembengo:

”iya, setiap hari Jumat ada pemberitahuan oleh ketua takmir soal pengeluaran dan pemasukan keuangan, ada setiap hari Kamis itu ada celengan, jadi setiap hari Kamis celengan itu wajib diisi, jadi masyarakat *Bongohulawa* di sini itu sudah percaya, sudah tidak ada lagi prinsip penipuan, karena tradisi ini sudah dari turun-temurun sudah dari zaman dulu, jadi setiap hari Jumat sebelum sholat masih dibacakan oleh ketua takmir tentang keuangan masjid, pemasukannya, pengeluarannya, jadi ketika ada pembangunan, itu mereka jumlahkan, kemudian disampaikan oleh ketua Tamirul berapa jumlah pengeluaran, begitu. Jadi memiliki hasil, jadi mereka sudah tidak membutuhkan

bukti. Tetapi ketua takmir memang sudah lama, beliau sudah lama mengurus masjid jadi masyarakat sudah percaya 100% kepada beliau, sebenarnya beliau mau mengundurkan diri, tetapi masyarakat tidak mengizinkan, karena masyarakat sudah percaya 100% kepada beliau, sehingga mereka tidak mau beliau itu digantikan”

Cuplikan wawancara ibu Ika sebelumnya memberikan pemahaman pada peneliti bahwa bentuk pertanggungjawaban pengurus masjid tentang keuangan masjid dilakukan dengan cara menyampaikan langsung pemasukan dan pengeluaran dana masjid sebelum pelaksanaan solat jumat, sementara itu, di hari Kamis, masyarakat setempat mengenal istilah celengan. Penuturan ibu Ika sebelumnya juga menginformasikan bahwa masyarakat setempat percaya dengan bentuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh pengurus masjid. Hal tersebut bukan saja disebabkan adanya informasi mengenai arus masuk dan keluar dana, namun juga masyarakat setempat telah melihat hasil pembangunan dari dana yang dikumpulkan oleh pengurus masjid.

### **Nilai-Nilai Kearifan Lokal Gorontalo dalam Praktik Akuntansi di Masjid Gorontalo**

Berdasarkan hasil temuan yang telah dibahas sebelumnya, ditemukan bahwa praktik akuntansi masjid berupa modal, penggunaan biaya, pencatatan, serta pertanggungjawaban/akuntabilitas akuntansi dipraktikkan dengan nilai non materi berupa keikhlasan (*ihilasi*), tanggung jawab (*dudaha*), serta rasa percaya (*paracaya*).

Nilai keikhlasan dari praktik akuntansi masjid tercermin melalui tindakan para pemberi sumbangan yang secara rutin memberikan sedekah untuk kegiatan ibadah di masjid, tindakan dari petugas kebersihan, serta imam masjid yang hakikatnya melaksanakan ibadah semata-mata untuk mendekatkan diri pada-Nya (bukan untuk memperoleh upah dari membersihkan masjid ataupun menjadi iman). Praktik akuntansi

berbasis nilai keikhlasan telah ditemukan juga oleh beberapa peneliti diantaranya (Kusdewanti & Hendrawaty, 2014; Thalib, 2021; Thalib, Sujianto, Sugeha, Huruji, & Sahrul, 2022; Ubaidillah, Mulyani, & Effendi, 2013).

Selanjutnya, praktik akuntansi berbasis pada nilai tanggung jawab (*dudaha*) tercermin melalui tindakan dari pengurus masjid yang secara suka rela mencatat dan melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana sumbangan masyarakat, serta mengelola dan menggunakan dana tersebut sesuai dengan amanah yang diperoleh yaitu untuk kegiatan ibadah di masjid. Praktik akuntansi berbasis nilai tanggung jawab serupa dengan temuan dari (Putra & Muliati, 2020; Sasmita, Hanif, & Arinata, 2019; Thalib, 2019b; Thalib, Rahman, Abdullah, & Gobel, 2021; Widhianningrum & Amah, 2014).

Lebih lanjut, praktik akuntansi di masjid yang hidup dengan nilai rasa percaya ini tercermin melalui keputusan masyarakat setempat yang enggan membiarkan bapak Hayyum Koem untuk berhenti jadi amanahnya sebagai pengurus masjid. Rasa percaya ini pula hidup disebabkan praktik akuntabilitas keuangan yang rutin disampaikan setiap minggunya oleh pengurus masjid, bentuk pertanggungjawaban keuangan tersebut memang sangat sederhana, sebatas menyampaikan dana yang terkumpul dan penggunaan dana, namun dari praktik akuntabilitas yang sedemikian tersebut ternyata bisa menimbulkan rasa percaya dikalangan masyarakat setempat. Praktik akuntansi berbasis nilai saling percaya serupa dengan temuan dari (Arena, Herawati, & Setiawan, 2017; Darmada, Atmadja, & Sinarwati, 2016; Nurhalimah, Setiawan, & Haryadi, 2019; Thalib, 2019a, 2021).

Nilai-nilai berupa keikhlasan, tanggung jawab, dan rasa percaya dari praktik akuntansi di masjid pada hakikatnya merupakan beberapa nilai-nilai kehidupan yang sering dinasihatkan oleh para tua-tua di Gorontalo melalui *lumadu* “*diila o’onto, bo wolu-woluwo*” artinya tidak kelihatan tetapi ada. Makna ungkapan ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan, jangan hanya mengejar yang kelihatan tetapi juga mencari sesuatu yang

tidak kelihatan tetapi sebenarnya ada. Yang diungkapkan dengan o'onto atau kelihatan adalah materi sedangkan yang tidak kelihatan, tetapi ada ialah yang memberikan materi itu, yaitu Allah Subbana Huwata'ala. Ungkapan ini sering dipakai oleh para *mubaligh* dalam berdakwa, sebagai peringatan untuk banyak bersyukur, berzikir, dan beramal ibadah. Jangan hanya terpaku dengan yang kelihatan, agar ada keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat (Daulima, 2009).

### KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap praktik akuntansi di masjid berbasis nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik akuntansi masjid berupa modal, pembayaran biaya, pencatatan akuntansi dengan gaya yang sederhana, serta akuntabilitas dana. Praktik akuntansi ini digerakkan dengan semangat keikhlasan (*ihilasi*), tanggung jawab (*dudaha*), dan saling percaya (*paracaya*). Semangat tersebut merupakan beberapa nilai kearifan lokal masyarakat Gorontalo yang sering disampaikan oleh *tua-tua* melalui *lumadu* (ungkapan) "*diila o'onto, bo wolu-woluwo*". Saran untuk riset selanjutnya untuk mengkaji praktik akuntabilitas keuangan masjid berbasis nilai kearifan lokal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arena, T., Herawati, N., & Setiawan, A. R. (2017). " Akuntansi Luar Kepala " dan " Sederhana " ala UMKM Batik Tanjung Bumi yang Sarat Nilai Religiusitas dan Kesalingpercayaan ( Sebuah Studi Etnografis )\*. *Jurnal Infestasi*, 13(2), 309–320.
- Azwari, P. C. (2018). Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi Untuk Entitastempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan Psak 45 Dan Psak 109). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 84–101. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2304>
- Baruadi, K., & Eraku, S. (2018). *Lenggota Lo Pohutu (Upacara Adat Perkawinan Gorontalo)* (1st ed.; T. Paedaso, Ed.). Gorontalo: Ideas Publishing.
- Creswell, W. J. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih antara Lima Pendekatan. Terjemahan. Ahmad Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Subak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 1–155. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7004>
- Daulima, F. (2009). *Lumadu (Ungkapan Sastra Lisan Daerah Gorontalo)*. Gorontalo: Galeri Budaya Daerah Mbu'i Bungale.
- Firdaus, D. W., & Yulianto, H. D. (2018). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Entitas Nirlaba dalam penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akuntabilitas Masjid. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Hidayatullah, A., Sulistiyo, A. B., & Hisamuddin, N. (2019). Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i1.11102>
- Kamayanti, A., & Ahmar, N. (2019). Tracing Accounting in Javanese Tradition. *International Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2019.4.003>
- Kusdewanti, A. I., & Hendrawaty, R. (2014). Memaknai Manajemen Bisnis Islami Sebagai Kehidupan Yang Menghidupi. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(2), 35–53. <https://doi.org/10.34202/imanensi.2.1.2014.32-50>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian*



- Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- 74–79. <https://doi.org/10.21009/JPUD.102.01>
- Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhalimah, Setiawan, A. R., & Haryadi, B. (2019). Praktik Akuntansi Manajemen Bisnis Besi Tua Berbasis Budaya Persaudaraan Madura. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 1–21. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10001>
- Nurindrasari, D., Triuwono, I., & Mulawarman, A. D. (2019). Konsep Pengukuran Kinerja Berbasis Kesejahteraan Islam. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 394–416. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9024>
- Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2020). Spirit Kearifan Lokal Bali Dalam Akuntabilitas Desa Adat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 561–580. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.32>
- Qomar, N. N., Yulinartati, Y., & Nastiti, A. S. (2019). Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 281. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21054>
- Rini, R. (2019). Pengelolaan Keuangan Masjid Di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 109–126. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.1>
- Sasmita, D. A., Hanif, G. K., & Arinata, N. D. (2019). Interpretasi Praktik Akuntansi Menurut Perspektif Pengusaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Riset Akuntansi Mercubuana*, 3(3), 180–188. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3/i3.180>
- Siregar, L. M. (2018). Akuntansi Keuangan Masjid: Suatu Tinjauan. *Menara Ekonomi*, IV(2), 50–58.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Suwardjono. (2011). *Teori Akuntansi Pekerjaan Pelaporan Keuangan (ketiga)*. Yogyakarta: BPFE.
- Thalib, M. A. (2019a). Akuntansi “Huyula” (Konstruksi Akuntansi Konsinyasi Berbasis Kecerdasan Intelektual, Emosional, Spiritual, dan Sosial). *Jurnal Riset Akuntansi Mercubuana*, 5(1), 97–110. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i2.768>
- Thalib, M. A. (2019b). Mohe Dusa : Konstruksi Akuntansi Kerugian. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 11–31. <https://doi.org/10.18382>
- Thalib, M. A. (2021). “ O Nga : Laa ” sebagai Wujud Akuntabilitas Biaya Pernikahan. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 117–128. <https://doi.org/doi.org/10.33795/jraam.v5i1.011> Informasi
- Thalib, M. A. (2022a). Pelatihan Analisis Data Model Miles dan Huberman untuk Riset Akuntansi Budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>
- Thalib, M. A. (2022b). Pelatihan Desain Riset Akuntansi Budaya Menggunakan Metode Kualitatif. *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 7–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.55657/kjpm.v1i1.17>
- Thalib, M. A., Rahman, S., Abdullah, M. K., & Gobel, Y. P. (2021). Akuntansi Potali: Membangun Praktik Akuntansi Penjualan di Pasar Tradisional (Studi Etnometodologi Islam). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(23), 25–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um004v8i12021p25>
- Thalib, M. A., Sujianto, A. N., Sugeha, H. F., Huruji, S., & Sahrul, M. (2022). Praktik Akuntansi Keuntungan berbasis Nilai Sabari dan Huyula (Studi Kasus pada Pedagang Sembako di Gorontalo). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit Syariah*, 2(1), 146–163.
- Triuwono, I. (2006). Akuntansi Syari’ah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo Gusti. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*.
- Triuwono, I. (2010). “Mata Ketiga”: SÈ LAÈN,, Sang Pembebas Sistem

- Pendidikan Tinggi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 1–23. <https://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7077>
- Triuwono, I. (2011). *Angels Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah* (pp. 1–21). pp. 1–21. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7107>
- Triuwono, I. (2015a). Akuntansi Malangan: Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 290–303. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6023>
- Triuwono, I. (2015b). Filosofi Tauhid: Mendekonstruksi Pendidikan Akuntansi Syariah yang Sekuler. *Workshop Nasional Kurikulum Akuntansi Sayriah*, 6–7.
- Ubaidillah, A., Mulyani, S., & Effendi, D. E. (2013). Makna Keuntungan Bagi Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Bangsri Jepara). *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 14(1), 65–77.
- Widhianningrum, P., & Amah, N. (2014). Akuntansi Ketoprak: Sebuah Pendekatan Etnografi Masyarakat Seni Ketoprak Di Pati. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 3(2), 136. <https://doi.org/10.25273/jap.v3i2.1218>